

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN
INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

OLEH :

**ANDYRWANTO
10800111019**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

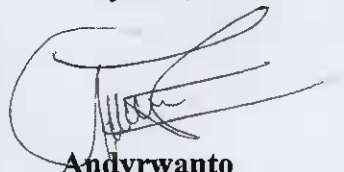
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andyrwanto
NIM : 10800111019
Tempat/Tgl. Lahir : Karebosi, Selayar/25 Juni 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi
Fakultas/Program : Ekonomi & Bisnis Islam
Alamat : JL. Sultan Alauddin. No. B.1
Judul : “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Maret 2016

Penyusun,


Andyrwanto
10800111019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening (Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)**", yang disusun oleh **Andywanto** NIM: **10800111019**, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 28 Dzulkaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 31 Agustus 2016 M

28 Dzulkaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag

Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin., M.Ag

Munaqasyah I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak (X.....)

Munaqasyah II : Saiful Muchlis, SE., M.Si., Ak

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si

Pembimbing II : Memen Suwandi, SE., M.Si

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M. Ag



NIP: 19581022 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamiin, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas Berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah Dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari tinjauan teoretis, analisis, maupun pembahasan selama menempuh studi maupun dalam merampungkan dan menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. H. Musafir Pababbari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Jamaluddin Madjid., SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Bapak Memen Suwandi SE, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si. dan bapak Memen Suwandi, SE., M.Si. selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan, arahan, dan petunjuk mulai dari membuat proposal hingga rampungnya skripsi ini.

5. Segenap Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan pelayanan selama penulis melakukan studi.
6. Seluruh Pejabat beserta anggotanya di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar yang memberikan waktu sebagai responden dalam penelitian ini.
7. Sahabat-sahabatku terutama kepada Azura Adawiyah, Sulkarnaim, SE, Asrul, SE, Burhanuddin, SE, Agustan, Eni Novita Sari, SE, Nur Hidayat, S.Pd dan rekan-rekan dari AK.12 yang tidak bisa saya tuliskan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat angkatan 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu atas persaudaraan, keakraban, motivasi dan partisipasinya selama penulis menempuh pendidikan di universitas
9. Keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, Amirullah dan Sittin Nuraeni, S.Pd serta saudaraku Andirwana, S.Si dan Achmad Syawal atas segala curahan doa, motivasi dan kerja keras sehingga penulis sampai pada titik ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan Ridho-Nya. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamiin.

Samata, 22 Maret 2016

Penulis

Andyrwanto

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1-15
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah6
C. Hipotesis	7
D. Definisi Operasional	10
E. Kajian Pustaka	13
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUANTEORETIS	 16- 44
A. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	16
B. Perencanaan Anggaran	24
C. Pengendalian intern	29
D. Realisasi Anggaran.....	34
E. Akuntabilitas Keuangan Daerah.....	36
F. Kerangka Pikir.....	43
 BAB III METODE PENELITIAN	 45-54
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Paradigma Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian.....	48
F. Metode Analisis Data	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 55-97
A. Gambaran Objek Penelitian	55
B. Analisis Statistik Deskriptif	65
C. Deskripsi Pernyataan.....	66

	D. Hasil Uji Kualitas Data	75
	E. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80
	F. Hasil Uji Hipotesis	84
	G. Pembahasan.....	93
BAB V	PENUTUP.....	98-100
	A. Kesimpulan	98
	B. Implikasi Penelitian.....	99
	C. Keterbatasan Penelitian dan Saran	99
	DAFTAR PUSTAKA	101-104
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pikir.....	44
Gambar 4.1. Uji Normalitas (Histogram)	81
Gambar 4.2. Uji normalitas (Normal Plot).....	82
Gambar 4.3. Uji Heteroskedastisitas	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Definisi Operasional Variabel.....	11
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden	61
Tabel 4.2. Tingkat Usia Responden	62
Tabel 4.3. Masa Kerja Responden	62
Tabel 4.4. Tingkat Pendidikan Responden	63
Tabel 4.5. Nama Instansi Responden.....	64
Tabel 4.6. Ihtisar Rentang skala variabel	65
Tabel 4.7. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.8. Pernyataan Responden Mengenai Perencanaan Anggaran	67
Tabel 4.9. Pernyataan Responden Mengenai Pengendalian Intern	69
Tabel 4.10. Pernyataan Responden Mengenai Realisasi Anggaran	71
Tabel 4.11. Pernyataan Responden Mengenai Akuntabilitas	73
Tabel 4.12. Uji Validitas Variabel X1	76
Tabel 4.13. Uji Validitas Variabel X2	77
Tabel 4.14. Uji Validitas Variabel X3	78
Tabel 4.15. Uji Validitas Variabel Y	78
Tabel 4.16. Hasil Uji Reabilitas	79
Tabel 4.17. Hasil Uji Normalitas	81
Tabel 4.18. Hasil Uji Multikolonieritas	83
Tabel 4.19. Hasil Uji Koefisien Detereminasi(H_1)	85
Tabel 4.20. Hasil Uji Simultan (f).....	85
Tabel 4.21. Hasil Uji t Hitung (H_1).....	86
Tabel 4.22. Hasil Uji Koefisien Detereminasi	87
Tabel 4.23. Hasil Uji Simultan (f).....	88
Tabel 4.24. Hasil Uji t Hitung	89

ABSTRAK

Nama : Andyrwanto
NIM : 10800111019
Judul : Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kabupaten Kepulauan Selayar)

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran sebagai variabel bebas sedangkan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagai variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menekankan pada metode analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner yang diesbarkan peneliti kepada responden terdapat di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling* dengan sampel yang diperoleh sebanyak 69 sampel. Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan uji statistik berganda yaitu uji t dan uji f.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Pada analisis regresi variabel intervening di temukan bahwa realisasi anggran dapat memediasi antara perencanaan dan akuntabilitas begitu pula dengan variabel pengendalian intern.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat. Pada era ini pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan adanya kebijakan ini maka yang perlu diperhatikan adalah perangkat daerah atau yang biasa disebut dengan SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/ bupati/ walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan. dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang (Dewi, 2014). Dengan diberikannya wewenang oleh pemerintah pusat ke daerah yang di sebut dengan otonomi daerah, akan mengakibatkan banyak penyimpangan yang terjadi di daerah, olehnya itu dibutuhkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah daerah (*Accountability*).

Perhatian terhadap isu akuntabilitas keuangan publik diindonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: (1) Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara; (2) Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Windah, 2015).

Pelaksanaan Otonomi daerah akan membutuhkan sebuah pertanggung- jawaban kepada publik dimana pernyataan ini diperjelas dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Undang-Undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan menggambarkan serta memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termaksud daya saing pemerintah daerahnya. (Espinnoza, 2014).

Agar transparansi dan akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat diimplementasikan di daerah, sehingga dapat menghasilkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yang diharapkan dapat

mengganti sistem akuntansi yang selama ini diterapkan di pemerintah daerah (Rabbani, 2015).

Olehnya itu sangat penting diperhatikan mengenai efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan program yang telah di anggarkan sampai dengan pelaporan/pertanggung jawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Tamesoleng, 2015), Penyusunan anggaran merupakan suatu rencana tahunan sebagai aktualisasi pelaksanaan rencana jangka panjang maupun menengah. Tahap awal dari penyusunan anggaran yaitu perencanaan anggaran. Perencanaan sendiri merupakan sunnatullah. Dalam konsep manajemen islam dijelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya Organisasi) Hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat dimasa lalu untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dihari esok. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr : 18 Allah Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr : 18).

Setelah anggaran tersebut selesai direncanakan maupun dilaksanakan maka dibuatlah laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah seperti yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 24

tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. secara operasional, menteri dalam negeri telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan kepmendagri Nomor 13 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan transparansi laporan keuangan. secara teknis, perkiraan keadaan yang akan terjadi di masa mendatang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran. keadaan internal yang berada di bawah kendali semestinya bisa diakomodasikan dengan baik. persoalan yang muncul adalah perubahan-perubahan eksternal yang berada diluar kendali sehingga sulit diperkirakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (Yandra, 2010)

Seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 bahwa dalam penyusunan anggaran dibutuhkan pengendalian internal, dimana sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan suatu organisasi sektor publik. Karena setelah adanya rencana anggaran yang baik maka diperlukan pengendalian dalam hal ini adalah pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan. Pengawasan dapat digunakan sebagai penilai dari pelaksanaan dari sebuah rencana dan apabila realisasi tidak sesuai maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Hal ini sesuai dengan QS.

Al-Asyr ayat 3 yang dijadikan sebagai landasan koreksi suatu kesalahan dalam islam yaitu;

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ

Terjemahan : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetepi kesabaran. (QS. Al-Ashr : 3)

Ayat diatas menunjukkan betapa pentingnya pengendalian internal dalam setiap lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintah sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko yang mungkin ada. sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Saleba, 2014).

Pada kabupaten kepulauan selayar sendiri sangat penting diperhatikan mengenai anggaran, mengenai bagaimana proses perencanaan, pengendalian serta apakah realisasinya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya atau tidak, banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di kabupaten kepulauan selayar diantaranya adalah Mark up pengadaan 1789 tiang listrik beton senilai 6, 3 Milyar, Percetakan sawah baru TA. 2008 di Pulau Jampea sebesar 1,8 Milyar, Mark up pengadaan kantor perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar di Jakarta sebesar 3 Milyar, Gratifikasi proyek-proyek jasa perencanaan TA.2013 senilai Rp200 Juta, Mark up pekerjaan jalan lingkar Pulau Jampea TA. 2013 sebesar, 8 Milyar, Mark up pengadaan tanah TA. 2013, sebesar 6 Milyar, dan Pengadaan Alkes Rumah Sakit Umum Daerah KH. Haiyung Benteng.

Jadi dengan berlakunya otonomi daerah akan memacu terjadinya banyak penyimpangan dalam bidang pengelolaan anggaran di tiap daerah. Dimana kita

ketahui bahwasanya otonomi daerah tersebut merupakan pelimpahan wewenang maupun kekuasaan kepada pihak daerah. Apalagi pada zaman sekarang penempatan SDM yang dilakukan oleh daerah biasanya tidak sesuai dengan kompetensi dari SDM tersebut, sama halnya di kabupaten kepulauan Selayar dicurigai banyak dilakukan penyimpangan terkait penganggaran. Baik itu dalam bidang pembangunan maupun pendidikannya, Karena kita ketahui bersama bahwasanya kabupaten kepulauan selayar merupakan salah satu kabupaten kepulauan yang tertinggal di provinsi sulawesi selatan. disinilah peneliti tertarik meneliti tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Dengan Realisasi Anggaran dengan variabel intervening.

B. Rumusan Masalah

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas finansial kepada stakeholdernya untuk menciptakan akuntabilitas daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal antara lain : anggaran, pengendalian, dan sistem pelaporan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas?
2. Apakah pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas?
3. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening?
4. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening?

5. Apakah pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas?

C. Hipotesis

1. Perencanaan anggran terhadap akuntabilitas

Perencanaan anggaran merupakan bagian yang penting dalam proses penyusunan anggaran dimana dalam penyusunan anggaran ini harus dilandaskan atas dasar kebutuhan satu daerah. oleh sebab itu setiap anggaran publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat banyak dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan implementor serta meningkatkan wibawa pemerintah. Anggaran menjadi sangat esensial dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah dengan melibatkan masyarakat. penyusunan anggaran harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima secara umum (Espinoza, 2014). Pada masa sekarang ini mekanisme perencanaan penganggaran daerah telah berlangsung dalam format demokratis. Kondisi ini di tandai dengan adanya ruang akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah. Mekanisme akuntabilitas sosial ini diyakini menguatkan bentuk kontrol publik untuk meminta akuntabilitas pemerintah dan pejabat politik dalam proses perencanaan penganggaran (Wahyunengseh, 2016). dari pemikiran diatas peneliti menetapkan (H1) yaitu:

H1 : perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

2. Pengendalian Intern terhadap akuntabilitas

Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 2 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga,

gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan sistem pengendalian intern pemerintah kompetensi sumber daya manusia efektivitas pengelolaan keuangan daerah pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristanti widyaningsih (2011) yang menyatakan terdapat hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan daerah.”, Olehnya itu disimpulkan bahwa:

H2 : Pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

3. Pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening

Dengan diberlakukannya otonomi daerah pada masa sekarang, satuan kerja daerah yang disingkat dengan SKPD harus lebih berperang maksimal, dimana pemerintah daerah berperang langsung dalam proses penyusunan anggaran mulai dari perencanaan hingga perealisasi anggaran tersebut. Proses perencanaan anggaran diawali dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Perencanaan strategis yang dibuat harus berorientasi pada keinginan dan kebutuhan masyarakat sebagai *stakeholders* utama. Berdasarkan rencana strategis yang sudah ditetapkan tersebut setiap tahunnya dituangkan dalam suatu rencana kinerja tahunan. Otonomi daerah ini dianggap mampu untuk memajukan ekonomi di daerah masing-masing. Olehnya itu setiap program yang telah terealisasi akan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat sebagai lembaga pemegang wewenang tertinggi. Friska (2014) menyatakan bahwa Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Olehnya itu disimpulkan bahwa:

H3 : Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.

4. Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening

menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Dalam penyajian laporan keuangan salah satu yang diperlukan adalah pengendaliannya atau pengawasannya. Dimana setiap organisasi atau instansi harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di rencanakan. Dimana dalam tahap perealisasiannya diperlukan adanya pengawasan. Sugiharto (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dilakukan dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai dan perlu dilakukan analisis *varians* (selisih) terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi ke depan. olehnya itu disimpulkan bahwa:

H4 : Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening

5. Pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas

Pada bagian selanjutnya yang harus diperhatikan adalah mengenai pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan ini adalah tahap akhir dari penganggaran, dalam pelaksanaan anggaran dikeluarkan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan mengenai realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif (Basri, 2013). dengan demikian peneliti menyimpulkan:

H5 :Realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

D. Defenisi Operasional

Definisi Operasional Variabel Penelitian Variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran sebagai Variabel independen dan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebagai variabel dependen. Variabel-variabel yang diteliti adalah :

1. Perencanaan Anggaran

Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan anggaran yaitu keterlibatan seluruh anggota SKPD dalam perencanaan anggaran tersebut dan apakah perencanaan tersebut dapat terealisasi kedepannya dan apakah telah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Tahap perencanaan harus memperhatikan tujuan dari anggaran dan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran.

2. Pengendalian Intern

Variabel yang juga penting dalam penelitian ini adalah Pengendalian Intern dimana pihak dari SKPD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran itu sendiri agar dapat dipertanggung jawabkan nantinya.

3. Realisasi Anggaran

Variabel independen yang terakhir adalah Realisasi anggaran dimana realisasi dari anggarannya sendiri harus sesuai dengan perencanaan semula, tidak boleh di kurangi maupun di tambahkan dari perencanaan semula, realisasi anggaran harus tepat pada sasarannya dimana anggaran itu dibutuhkan, dalam realisasi anggaran dibuatlah sebuah laporan realisasi anggaran (LRA)

4. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertanggung jawaban keuangan daerah. Pertanggung jawaban keuangan daerah ada dua yang pertama adalah kepada masyarakat dan yang kedua adalah kepada pemerintah pusat. Seiring dengan berlakunya otonomi daerah maka pertanggung jawaban harus lebih dioptimalkan. Sedangkan pertanggung jawaban pada masyarakat dilakukan dengan pelaksanaan dari perencanaan itu sendiri dan transparansi atas pelaksanaan anggaran itu sendiri.

Tabel 1.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Pengukuran
Perencanaan Anggaran (X1)	1. Penjabaran visi dan misi 2. Rencana kerja dan pendanaannya termuat dalam RKPD 3. KUA dan PPAS digunakan dalam penyusunan RKA	Ordinal

	<ol style="list-style-type: none"> 4. RKA didasarkan pada PPA 5. RKA didasarkan pada prinsip akuntabilitas 6. Rencana anggaran akan di pertanggungjawabkan 7. Pemeriksaan Bagian Perencanaan 	
Pengendalian Internal (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instansi memiliki kode etik dan pengendalian yang jelas 2. Satuan Pengawasan intern terdiri dari staf yang kompeten 3. Pertanggungjawaban pengendalian 4. pengendalian efektif mengawasi anggaran 5. Pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern. 	Ordinal
Realisasi Anggaran (X3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas 2. Setiap instansi melaporkan hasil dari realisasinya berupa laporan LRA 3. LRA termasuk dalam laporan pertanggung jawaban 4. LRA mempengaruhi pertanggung jawaban 	Ordinal
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjabaran visi misi dalam rencana strategis 2. Penyampaian Rancangan APBD 3. Analisis keuangan dan laporan setiap program terealisasi 4. Pemantauan pada program 5. Pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah 6. Laporan Keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK 	Ordinal

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting di paparkan karena dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan acuan bagi penulis. penelitian sebelumnya yang di anggap masih relevan dengan judul mengenai Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal maupun Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Paradigma Penelitian	Hasil
Aristanti Widyaningsih, Dkk (2011)	Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening (Pemda Kab/Kota Provinsi Jawa Baarat	Kuantitatif	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif dan pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap penerapan akuntabilitas.
Ummu Kaltsum dan Abd. Rohman (2013)	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi	Kuantitatif	Menyimpulkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berp

	pemerintah melalui sistem pengendalian intern sebagai variabel intervensi yang dilakukan di SKPD kota Salatiga.		engaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. dan Sistem Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Farida Ulfa (2008)	Peranan anggaran sebagai salah satu alat perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang berlokasi di kabupaten Mojokerto.	Kualitatif	Menyimpulkan bahwa Anggaran pemerintah atau sering disebut dengan APBD mempunyai peran yang penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Mappilagau (2002)	Analisis efektifitas perencanaan dan pelaksanaan APBD Provinsi Sulsel.	Kualitatif	Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Sulsel sangat efektif dilihat dari perbandingan target dan realisasinya. Pada dasarnya kegiatan perencanaan dan pelaksanaan memiliki keterkaitan peran.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas.
3. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.

4. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.
5. Untuk menganalisis pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi pada teori yang digunakan pada penelitian ini. Perencanaan anggaran dan pengendalian intern dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening telah dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori dan objek penelitian yang berbeda-beda. Misalnya yang dilakukan oleh Farida (2008), Widyaningsi (2011) dan Rozaki (2012). Pada penelitian ini akan dilakukan di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan *agency theory*. Perbedaan ini akan menegaskan bahwa *agency theory* dapat menjelaskan Perencanaan anggaran dan pengendalian intern dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening di Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi tambahan atau masukan bagi pejabat pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam hal penyempurnaan dan perbaikan penyusunan anggaran yang tentunya dimulai dengan pemahaman mengenai indikator-indikator anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen (agen yang mengatur manajemen sebuah usaha) dan principal (Pemilik usaha). Pemilik usaha disebut sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi yang disajikan oleh agen yang bertindak sebagai pihak yang mengambil keputusan. Teori keagenan menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer dengan pemegang saham, manajer dengan kreditur atau antara pemegang saham, kreditur dan manajer yang disebabkan adanya hubungan keagenan (*agency relationship*).

Dalam penelitian Pengaruh Perencanaan anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah peneliti menekankan SKPD sebagai pelaku atau pengelolah anggaran sebagai agen dan Pemerintah Pusat sebagai Pemilik usaha (*Principal*). Menurut Anthonhy dan Govindarajan (2012:269) *Agency theory* menjelaskan fenomena yang terjadi apabila atasan mendelegasikan wewenangnyanya kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas atau otoritas untuk membuat keputusan dimana disini dengan adanya otonomi daerah pihak pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengololah dana daerah itu sendiri dan membuat rangkaian anggarannya sendiri yang dimulai dari tahap perencanaan, pengendalian dan perealisasiannya, oleh dari kepercayaan itu maka pemerintah harus memberikan laporan yang sesuai dengan apa yang pemerintah daerah kerjakan atau dengan kata lain dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsipal akan selalu tertarik pada hasil-hasil yang dihasilkan oleh agen mereka. Teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peran ini seringkali diasosiasikan dengan peran kepengurusan (stewardship) akuntansi, dimana seorang agen melapor kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian dalam periode yang lalu. Inilah yang memberikan akuntansi nilai umpan baliknya selain nilai prediktifnya (Hendriksen dan Breda, 1992: 207). Teori keagenan juga dapat memperlihatkan apakah terjadi perbedaan antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran dimana faktor pengendalian internal dijadikan sebagai faktor yang menjadi pengawas berlansungnya program tersebut. Dengan teori keagenan memperlihatkan pertanggung jawaban atas anggaran yang diberikan oleh instansi kepada puncak pimpinan yakni DPR dan DPRD dimana inspektorat menjadi faktor yang mengawasi.

B. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran memegang peranan penting bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan perusahaan terlebih dahulu harus memahami betul apa itu anggaran (*budget*) dan manfaat dari anggaran itu sendiri. Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari kata “*budget*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari kata Perancis “*boutgette*” yang berarti *a small bag* (Ulfa, 2008).

Mardiasmo (2009:61) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan

dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Pengertian anggaran kemudian terus berkembang. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menyebutkan bahwa anggaran adalah alatakuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Berdasarkan pernyataan diatas, anggaran dapat diringkas menjadi:

- a. Rencana keuangan mendatang yang berisi pendapatan dan belanja;
- b. Gambaran strategi pemerintah dalam pengalokasian sumber daya untuk pembangunan;
- c. Alat pengendalian;
- d. Instrument politik;
- e. Di susun dalam periode tertentu

Menurut PSAP 01-2 paragraf 8 (Riansyah, 2013) mendefinisikan anggaran sebagai : "...pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode". Banyak pengertian anggaran negara yang ada pada berbagai literatur, namun para ahli di bidang anggaran sepakat memberikan pengertian umum sebagai berikut : "Anggaran Negara merupakan rencana keuangan pemerintah dalam suatu waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun mendatang, yang satu pihak memuat jumlah pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai tugas-tugas negaradi segala bidang, dan di lain piha memuat jumlah penerimaan negara yang diperkirakan dapat menutup pengeluaran tersebut dalam periode yang sama"(Sembiring, 2009).

Dalam Suatu instansi diperlukan perencanaan dan pengawasan yang matang mengenai anggaran agar hasil yang di dapatkan dapat maksiman dan sesuai dengan apa yang di inginkan atau direncanakan sebelumnya.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Nordiawan (2008:48) Dalam Ulfa (2011) fungsi anggaran diantaranya, yaitu:

- a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.
- b. Anggaran sebagai Alat Pengendalian dengan adanya anggaran organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
- c. Anggaran sebagai Alat Kebijakan melalui anggaran organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.
- d. Anggaran sebagai Alat Politik dalam organisasi, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
- e. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
- f. Anggaran sebagai alat Penilaian Kinerja Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

- g. Anggaran sebagai alat Motivasi Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

Sama halnya dengan pendapat Nordiawan, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2009:63-66) menambahkan satu fungsi utama yaitu Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*PublikSphere*) Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPRD. Masyarakat, LSM, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok masyarakat yang tidak terorganisir akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik sehingga akan dengan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan aspirasi mereka, maka akan terjadi tindakan massa yang tidak diinginkan.

Jadi bisa dikatakan bahwa anggaran adalah alat yang digunakan sebagai, perencanaan, pengendalian, koordinasi, penilaian, kebijakan, memotivasi, politik dan untuk menciptakan ruang publik demi menjamin program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

3. Prinsip Anggaran

Beberapa prinsip Anggaran Menurut Ulfa 2011, antara lain:

- a. Otorisasi oleh legislatif anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat menggunakan atau merealisasikan anggaran tersebut.

- b. Komprehensif atau menyeluruh anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetair pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
- c. Keutuhan semua penerimaan dan pengeluaran tercakup dalam satu dana umum.
- d. Nondiscretionary apropriasi Jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Periodik anggaran merupakan suatu proses yang disusun pada setiap periode, baik tahunan maupun multi-tahunan.
- f. Akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya under-estimate pendapatan serta over-estimate pengeluaran atau belanja.
- g. Jelas anggaran hendaknya disusun secara sederhana, dapat dipahami masyarakat luas, dan tidak membingungkan bagi para pengguna.
- h. Transparan anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

4. Tujuan Penyusunan Anggaran

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:75), penyusunan anggaran memiliki empat tujuan utama, yaitu :

- a. Menyelaraskan dengan rencana strategis
- b. Mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi
- c. Penugasan tanggung jawab kepada manajer
- d. Dasar evaluasi kinerja

Menurut Hansen dan Mowen (2009:424) dalam Riansah (2013) suatu sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi:

- a. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, anggaran mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi secara menyeluruh, mengantisipasi masalah, dan mengembangkan kebijakan untuk masa depan;
- b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki keputusan;
- c. Anggaran memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya perusahaan dan memotivasi karyawan;
- d. Anggaran juga membantu komunikasi dan koordinasi, agar semua unit dalam organisasi dapat menyadari perannya dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Berbeda halnya menurut Sembiring 2009 yang menyebutkan bahwa Penganggaran memiliki tiga tujuan utama yang saling terkait yaitu stabilitas fiskal makro, alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Anggaran negara juga berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan aktivitas pemerintahan.

5. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik (Mardiasmo, 2009:61). bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Nordiawan, dkk, 2009 dalam Riansyah, 2013)

- a. Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Untuk memperoleh konsep yang lebih jelas mengenai anggaran sektor publik, berikut karakteristik anggaran yang dikemukakan Sumarsono (2010:48) dalam Riansyah (2013):

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan;
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;
- 3) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran;
- 4) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran;
- 5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi tertentu.

Karakteristik anggaran sector publik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anggaran secara konvensional yaitu mengukur anggaran dalam satuan keuangan maupun non-keuangan, yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk komitmen dalam pencapaian tujuan organisasi yang umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

b. Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009:66-67) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin (recurrent expenditure) adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Secara umum, pengeluaran yang masuk

kategori anggaran operasional antara lain; belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan.

- 2) Anggaran Modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Anggaran dibagi menjadi dua jenis yaitu anggaran operasional atau anggaran rutin karena sifatnya pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan dan anggaran modal yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan aktiva tetap.

C. Perencanaan Anggaran

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjabarkan tujuan perencanaan pembangunan nasional sebagai berikut :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Konsistensi perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Hal ini sangat mempengaruhi tercapainya visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan. Konsistensi perencanaan dan penganggaran memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Parura, 2015)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 153 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pengawasan. Undang-undang lain yang mendasari tentang perencanaan dan penganggaran, adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perencanaan daerah mengacu pada UU tersebut dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan anggaran antara yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swadaya masyarakat, sehingga dapat tercipta rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang efektif (Nugrohowati, 2015).

Mekanisme perencanaan penganggaran daerah telah berlangsung dalam format demokratis. Hal itu ditandai dengan adanya regulasi pendorong akuntabilitas publik, kehadiran ragam lembaga pengontrol akuntabilitas, dan pelibatan masyarakat sipil. Kondisi ini menandakan bahwa ada ruang akuntabilitas sosial dalam proses penganggaran daerah. Mekanisme akuntabilitas sosial ini diyakini menguatkan

bentuk kontrol publik untuk meminta akuntabilitas pemerintah dan pejabat politik dalam proses perencanaan penganggaran (Wahyunengseh, 2016).

1. Pengertian perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. (Didin dan Hendri, 2003 : 77 Dalam Ulfa, 2008).

Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (decision making), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Hasil yang ingin dicapai
- b. Orang yang akan melaksanakan
- c. waktu dan skala prioritas
- d. Dana (kapital)

Perencanaan dapat dikatakan baik, apabila memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa apa yang akan dilaksanakan adalah baik. Standar baik dalam agama Islam adalah yang sesuai dengan ajaran Islam.

- b. Dipastikan betul bahwa sesuatu yang dilakukan memiliki banyak manfaat. Manfaat ini bukan hanya sekadar untuk orang yang melakukan perencanaan, tetapi juga untuk orang lain.
- c. Didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan.
- d. Dilakukan studi banding (benchmark)
- e. Dipikirkan proses

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

“**Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)** adalah Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah” (Yandra, 2010)

Proses perencanaan APBD dengan paradigma baru menekankan pada pendekatan bottom-up planning dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat tertuang dalam dokumen perencanaan berupa GBHN, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA).

Sinkronisasi perencanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah pusat dengan perencanaan pembangunan daerah secara spesifik diatur dalam peraturan Pemerintah No. 105 dan 108 Tahun 2000. Pada Pemerintah pusat, perencanaan pembangunan dimulai dari penyusunan PROPENAN yang merupakan operasionalisasi GBHN. PROPENAS tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk

RENSTRA. Berdasarkan PROPENAS dan RENSTRA serta analisis fiskal dan makro ekonomi, kemudian dibuat persiapan APBN dan REPETA.

Sementara itu, ditingkat daerah (propinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA). Rincian RENSTRADA yang telah disusun untuk setiap tahunnya akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD. REPETADA memuat program pembangunan daerah secara menyeluruh dalam satu tahun. REPETADA juga memuat indikator kinerja yang terukur untuk jangka waktu satu tahun. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan daerah tahunan (REPETADA) dan rencana anggaran tahunan (APBD) pada hakekatnya merupakan perencanaan instrument kebijakan public sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Mardiasmo, 2002 : 124-126)

3. Perencanaan terhadap realisasi anggaran

Anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya anggaran merupakan suatu hal yang sangat dirahasiakan terutama untuk organisasi privat atau swasta, sedangkan untuk organisasi sektor publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh publik untuk dievaluasi, dikritik, dan diberi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Olehnya itu dibuatlah laporan pertanggungjawaban kepad pemerintah, laporan tersebut berisi mengenai laporan realisasi anggran (LRA). Dalam laporan LRA ini kita dapat melihat keberhasilan suatu daerah dengan membandingkan antara perancangan dengan realisasi anggrannya. Rendahnya realisasi anggaran pada bagian-bagian tertentu, menunjukan masih belum maksimalnya proses perencanaan (Friska, 2014).

D. Pengendalian Internal

1. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Hery (2011:87) Dalam Sulaeman (2012) sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen, bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi serta ketaatan pada hukum dan peraturan.

Pengertian SPI menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.

Menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan (Setiawan, 2012).

Dalam penyajian laporan keuangan salah satu yang diperlukan adalah pengendaliannya atau pengawasannya. Dimana setiap organisasi atau instansi harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di rencanakan dimana dalam tahap perealisasiannya diperlukan pengawasan seperti yang dikatakan hadis Rasulullah S.A.W bahwa :

حاسبوا أنفسكم قبل أن بحاسبوا ونوا أعمالكم قبل أن توزن (الحديث)

Artinya : Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).

Dalam penelitian ulang dilakukan oleh Sitti Nurjannah, 2014 mengemukakan terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut:

- a. pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. pengendalian intern dijalankan oleh orang.
- c. pengendalian intern diharapkan hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tiga tujuan yang saling terkait, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektivitas dan efisiensi operasi.

2. Prinsip Pengendalian Internal

Menurut Sanyoto (2007:250) Dalam Sulaeman (2012), ada beberapa asumsi dasar yang perludipahami mengenai pengendalian internal bagi suatu entitas organisasi atau perusahaan :

- a. Sistem pengendalian intern merupakan management responsibility. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen, lebih tegasnya lagi adalah top manajemen/direksi), karenadengan sistem pengendalian intern yang baik itulah top manajemen dapat mengharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan berjalan baik.
- b. Top manajemen bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian intern, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan tim yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi (mengingat saat ini sistem lazimnya dibuat berbasis teknologi informasi).
- c. Sistem pengendalian intern seharusnya bersifat generic, mendasar, dan dapat diterapkan pada semua perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya berlaku untuk satu perusahaan saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku umum).
- d. Sifat sistem pengendalian intern adalah reasonable assurance, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian intern yang paling baik ialah bukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan cost benefitnya.
- e. Sistem pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan atau constraints, misalnya adalah sebaik-baik control tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap, atau kolusi, maka tujuan pengendalian internal itu mungkin tidak tercapai.

- f. Sistem pengendalian intern harus selalu dan terus menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan, dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

3. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pertama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu data yang lengkap, akurat, unik, reasonable, dan kesalahan-kesalahan data dideteksi. Tujuan berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi, yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu transaksi akuntansi tepat. Tujuan selanjutnya ialah pengamanan asset, yaitu dengan adanya otorisasi, distribusi output, data valid dan diolah serta disimpan secara aman (Sulaeman, 2012).

Tujuan pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997: 178 dalam Ana, 2007) adalah :

- a. Pengendalian intern akuntansi (*Internal Accounting Control*). pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk :
 - 1) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalianyang memadai. begitu juga untuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik, seperti piutang akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting dan catatan akuntansi tidak dijaga.
 - 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan

usahanya. pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal. pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan yang andal.

b. Pengendalian intern administratif (*Internal Administrative Control*). pengendalian administratif meliputi kebijakan dan prosedur yang terutama untuk:

- 1) Mendorong efisiensi. karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan kekayaan perusahaan mendorong efisiensi.
- 2) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipahami oleh karyawan perusahaan atau koperasi.

4. Pengendalian intern terhadap realisasi anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan serta pertanggungjawaban kegiatan instansi pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menerapkan setiap unsur dari sistem pengendalian intern. Untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern tersebut sudah dirancang dan di implementasikan dengan baik dan secara memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus.

Sistem pengendalian perlu diterapkan dengan baik agar pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan bagi warganya, dan mampu merealisasikan anggaran dengan baik sesuai APBN dan APBD yang telah diberikan karena sistem pengendalian intern (SPI) merupakan implementasi dari tahap pengawasan yang terdapat dalam siklus anggaran (*budget cycle*) yang terdiri atas:

- a. Tahap penyusunan anggaran
- b. Tahap pengesahan anggaran
- c. Tahap pelaksanaan anggaran
- d. Tahap pelaksanaan pengawasan anggaran
- e. Tahap pengesahan perhitungan anggaran (Muhanafiah, 2015)

E. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran adalah pelaksanaan dari anggaran yang telah direncanakan. Dimana realisasi anggaran harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, tidak boleh kurang maupun lebih. Jadi apa yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran adalah anggaran sebenarnya yang telah di realisasi tanpa menambah maupun mengurangi. Hal ini sesuai dengan QS. As-Shaff ayat 3 yaitu :

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Terjemahan : Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan realisasi

anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidak pastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Basri, 2013).

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan entitas pelaporan.
- c. Periode yang dicakup.
- d. Mata uang pelaporan dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Unsur yang terdapat pada laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

F. Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*Accountability*) secara bahasa dapat diartikan sebagai Pertanggung jawaban. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Wahida, 2015).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999. Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik (Fatmala, 2014).

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik (Fatmala, 2014).

Dalam hal akuntabilitas atau pertanggung jawaban, pemerintah daerah selaku wakil rakyat yang diberi amanah untuk menggarut keuangan rakyat harus

mempertanggung jawabkan apa yang telah dikerjakannya sebagai pemimpin yang baik.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi public Menurut Wahida 2015 antara lain, yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan bahwa komponen yang harus terdapat dalam suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi; Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintahan. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang (Setiawan, 2012).

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintah adalah melayani kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya, yang dilaksanakan dengan pembentukan departemen atau dinas yang melaksanakan program. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”. Kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan menyampaikan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program

yang dilaksanakan kepada wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah (Sadjiarto, 2000).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan (UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004) pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), laporan keuangan SKPD yang telah disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah akhir tahun anggaran/periode akuntansi berakhir (Setiawan, 2012).

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah digunakan sebagai : (a) akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; (b) manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat (Wahida, 2013).

4. Akuntabilitas laporan Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan APBD. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pendek kata rencana pembangunan yang telah di rencanakan di dalam setiap instansi pemerintah harus di pertanggung jawabkan, jika ada perbedaan antara tahap perencanaan dengan realisasinya harus di telusuri apa penyebabnya dan tentunya harus di pertanggung jawabkan oleh pemerintah. karena segala sesuatu yang diperbuat harus ada pertanggung jawabanya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23E ayat 1 menyebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dalam menjalankan tugasnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, salah satunya adalah BPK memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, “BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara”.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK bertujuan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada, (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan atau prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (d) efektivitas sistem pengendalian intern (Setiawan, 2012).

Menurut Wahida, 2015 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (*dependent variabel*) merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD. Terdapat 4 indikator yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan yaitu:

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum yaitu akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- b. Akuntabilitas Proses yaitu terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas Program yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

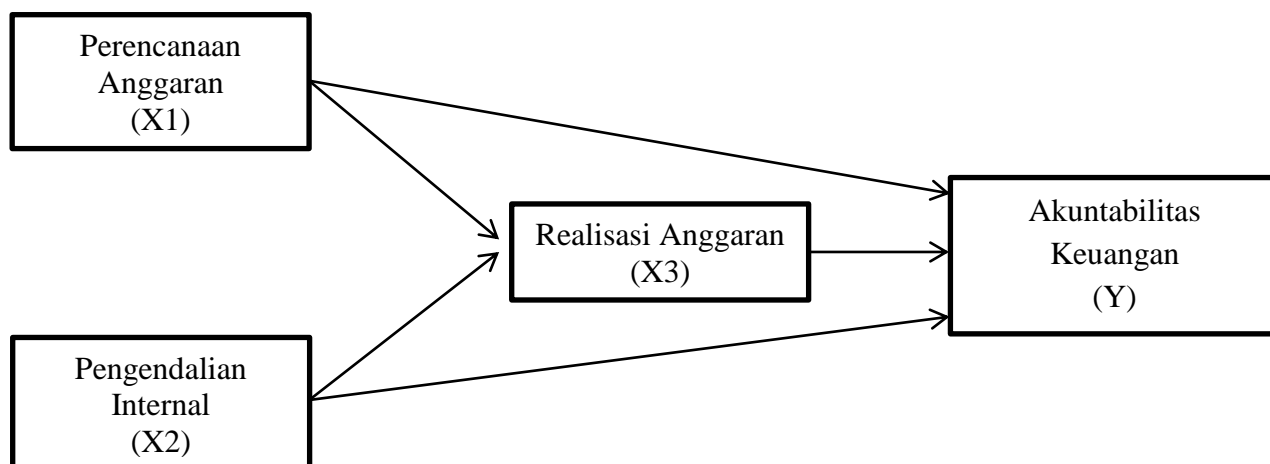
- d. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

G. Kerangka Pikir

Proses pengelolaan anggaran dalam hal pembangunan suatu daerah sangat penting dimana hal yang utama yang harus dilakukan adalah merencanakan anggaran yang akan di buat, merencanakan anggaran dengan melihat pada kebutuhan daerah tersebut. setelahnya pemerintah harus melakukan pengendalian internal yang dapat memantau apakah anggaran tersebut sudah benar dan sesuai dengan prosedur yang ada atau tidak, hal yang terakhir yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan anggaran ialah realisasi anggaran apakah sudah sesuai dengan apa yang di anggarkan atau tidak.

Peneliti tertarik meneliti mengenai akuntabilitas keuangan daerah di kabupaten kepulauan selayar karena daerah kabupaten kepulauan selayar yang bisa dikatakan sebagai daerah tertinggal. jadi, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas keuangan di setiap SKPD berjalan dengan selayaknya atau tidak. Berdasarkan latar belakang, landasan teori dan tinjauan empirik maka peneliti mengajukan ,model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan metode penelitian kuantitatif di mana penulis akan mencoba menjawab pengaruh antar variabel yang ada. Jenis ini digunakan untuk menjelaskan Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan Realisasi Anggaran sebagai variabel intervening. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian di sektor publik yaitu di instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

B. Paradigma Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan Supomo, 2014:12).

Penelitian ini lebih bersifat *Correlational Research* yang dilakukan dengan menguji pengaruh interaksi variabel independen variabel x) terhadap variabel dependen (variabel y) dengan variabel intervening.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2014 :115). Secara teknis, populasi

menurut para statistikawan tidak hanya mencakup individu atau objek dalam suatu kelompok tertentu (Tiro, 2008 : 38). Sehingga populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena, atau konsep yang menjadi pusat perhatian. Dengan kata lain populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap dan dianggap bisa mewakili populasi. Metode penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, penentuan SKPD yang akan dijadikan sampel merupakan unsur dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan kehutanan, DPPKAD, Dinas Kebersihan, Inspektorat Kabupaten, BKD, Bappeda, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pemberdayaan Perempuan, Kesbang, Kantor Pelayanan terpadu, Kantor Pamong Praja, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral, Dinas Koperasi yang merupakan instansi yang terkait dengan anggaran. Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang mempunyai jabatan struktural dalam SKPD yaitu kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi sehingga yang menjadi responden adalah pegawai yang mengerti tentang proses penganggaran pada wilayah tanggung jawabnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Jenis dan Sumber Data

Data mempunyai sifat memberikan gambaran tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan (Indriantoro dan Supomo, 2014:

146) adalah :

- a. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tidak melalui perantara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan kepada responden.
- b. Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dicatat oleh pihak lain) dan merupakan data pendukung yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data sekunder dalam penelitian ini berupa visi dan misi, landasan teori yang diperoleh dari Jurnal Riset Akuntansi, skripsi, tesis serta buku-buku/literatur yang mendukung.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan pejabat yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran, dan pejabat pelaksana anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2014: 154).

Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mendapatkan data umum mengenai pejabat baik struktural maupun fungsional yang terlibat dalam proses

penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran, untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Perencanaan Anggaran (X1), dan Pengendalian Internal (X2) Realisasi Anggaran (intervening) terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Ragu-Ragu (R)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain; mean, median, minimum, maximum, dan standard deviation. Deskriptif karakteristik responden tersebut menjelaskan tentang gambaran umum responden, seperti jenis kelamin, umur

responden, lama bekerja, pendidikan terakhir responden dan jabatan responden yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi (persentase).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen penelitian. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, alat uji validitas yang digunakan adalah alat uji yang berdasarkan pendekatan *construct validity*, yakni dengan melihat korelasi skor per item dengan skor total seluruh item (*inter-item total correlation*). Metode yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen (*moment product correlation*) atau yang lebih dikenal dengan nama *pearson correlation*. Jika suatu indikator mempunyai korelasi antara skor masing-masing indikator terhadap skor totalnya (skor variabel konstruk) maka dikatakan indikator tersebut valid. Jika koefisien korelasi (r) bernilai positif dan lebih besar dari r tabel (pada taraf signifikansi 5% atau 0,05), maka dinyatakan bahwa butir pertanyaan tersebut valid atau sah. Namun jika sebaliknya maka bernilai negatif atau positif tetapi lebih kecil dari r table (pada taraf signifikansi 5% atau 0,05), maka butir pertanyaan dinyatakan invalid atau harus dihapus.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji reabilitas dengan bantuan SPSS akan

menghasilkan Cronbach Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0.60 (Sujarweni, 2014)

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis statistik non-parametrik One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Jika $\text{sig.} > 0,05$ maka data terdistribusi normal sedangkan jika $\text{sig.} < 0,05$ maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflating Factor*). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $< 0,1$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis hipotesis pada penelitian ini digunakan metode statistika. seluruh perhitungan statistik digunakan bantuan program SPSS. tingkat signifikansi

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05 (5%). model yang digunakan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 adalah model regresi berganda dan regresi intervening. untuk menguji Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening digunakan model persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_2$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas keuangan daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi untuk perencanaan anggaran

β_2 = Koefisien regresi untuk pengendalian intern

β_3 = Koefisien regresi untuk realisasi anggaran

x1 = Perencanaan anggaran

x2 = Pengendalian internal

x3 = Realisasi anggaran

e = Error

Dengan Menggunakan Perhitungan SPSS 22 akan diperoleh keterangan atau hasil tentang koefisien determinasi (R^2), Uji t untuk menjawab perumusan masalah penelitian. berikut ini keterangan yang berkenaan dengan hal tersebut, yakni :

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya apabila R^2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar

b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independent terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F tabel dengan F hitung. Untuk menentukan nilai F tabel, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (degrees of freedom) $df = (nk-1)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan semua variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis diterima;
- 2) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan semua variabel independen terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis ditolak.

c. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig (*significance*). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh

yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Asak, 2014).

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model uji regresi dengan pendekatan residual dengan melihat hasil uji t. Penarikan simpulan dari hipotesis didasarkan pada nilai probabilitas dari uji t baik pada variabel bebas maupun variabel moderasi yang terdapat dalam model uji. Jika probabilitas nilai t atau signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel moderasi secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel moderasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Visi Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi utama pembangunan tahun 2006-2026 *"Selayar Sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mapan, Mandiri dan Berkelanjutan"* Berlandaskan dari visi tersebut periode bupati syahrir wahab dan syaifvul arif memutuskan untuk mengajukan visi : Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera, dan Religius. Kemudian visi ini dicatat dalam RPJMD 2010-2015 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

- a. Maju dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana infrastruktur telah memadai, sumberdaya alam telah terkelola secara optimal, aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah dan antar wilayah kepulauan telah terbangun sehingga menempatkan Selayar sebagai kabupaten kepulauan yang terdepan, baik dalam regional maupun nasional.
- b. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan dan papan), kualitas SDM masyarakat sudah baik yang ditandai kualitas pendidikan dan kesehatan, berdaya beli tinggi, serta memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk mendukung upaya kemandirian lokal.
- c. Religius berarti internalisasi nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan. Ajaran Agama Islam maupun ajaran Agama lainnya, harus mampu

dilaksanakan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu seluruh kebijakan pembangunan harus berorientasi pada upaya memantapkan kehidupan yang religius, terutama kepemimpinan daerah dan aparatur agar senantiasa mencerminkan sikap dan perilaku dengan dasar keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia ditunjang oleh penerapan nilai kearifan lokal.

2. Misi Kabupaten Kepulauan Selayar

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) Tahun RPJMD 2010-2015, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kualitas sumber daya manusia menjadi indikator yang sangat penting dalam proses maupun pencapaian tujuan pembangunan. Tidak ada negara di dunia ini mampu menjadi negara maju jika tidak berangkat pada titik pijak pembangunan kualitas sumber daya manusia, diantaranya melalui capaian target-target Millenium Development Goals (MDGs). Manusia adalah subjek dan objek pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berarti pemenuhan kebutuhan pendidikan secara memadai, kesehatan secara utuh yang berkeadilan untuk seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan infrastruktur Membangun, meningkatkan dan pemeratakan infrastruktur agar bisa hidup layak, tidak terisolasi, memperlancar mobilitas masyarakat, barang dan jasa, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan keterkaitan antar wilayah, meningkatkan aktivitas sosial lainnya sehingga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Infrastruktur yang dimaksudkan yaitu jalan, jembatan, sarana air bersih dan sanitasi, energy, dan prasarana wilayah. Yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan infrastruktur untuk dapat membuka akses ke berbagai kantong produksi dan dapat

mempermudah pemasaran hasil-hasil produksi yang kemudian dapat mendorong pergerakan perekonomian daerah.

- c. Memberdayakan ekonomi kerakyatan Membangun fondasi ekonomi masyarakat dari sektor riil dan berbasis kerakyatan yang tangguh dan berproduksi tinggi dengan memfasilitasi berkembangnya unit-unit usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi yang sehat, yang akan memperluas kesempatan kerja dengan intervensi pada aksesibilitas modal lunak dari perbankan pemerintah maupun lembaga keuangan non bank, manajemen usaha dan ekspansi skala usaha. Memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menikmati pembangunan ekonomi secara lebih baik dan mereka juga dapat lebih jauh terlibat dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan yang tidak saja mengutamakan pertumbuhan tetapi juga distribusi, atau dikenal dengan “pertumbuhan dengan pemerataan” (growth with equity) dalam mewujudkan “pertumbuhan dengan basis yang luas” (broad-based growth). Pendekatan ekonomi kerakyatan ini berfokus kepada 3 (tiga) hal, yaitu:
 - 1) Mengedepankan kebijakan pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha – usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memecahkan permasalahan mereka sendiri pada tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
 - 2) Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang berfungsi dan sesuai kaidah-kaidah organisasi yang mandiri.
 - 3) Mengembangkan sistem produksi berdasarkan sumberdaya di setiap kawasan dan wilayah.

- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sumber daya alam yang melimpah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, perikanan, pertambangan, dan energy, perlu dikelola secara optimal sehingga sumber daya alam itu tidak hanya dieksploitasi oleh segelintir orang tetapi dinikmati dan mampu memenuhi kebutuhan bahkan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa melupakan pelestarian lingkungan.
- e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
- f. Mengembangkan pembinaan kehidupan beragama. Paham keagamaan selalu menjadi landasan dalam setiap gerak pembangunan bangsa sebagai pondasi dan benteng bagi kita terhadap pengaruh buruk dari globalisasi.

3. Organisasi dan Tata Kerja Daerah

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai landasan/Dasar Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi (Papan Tugas & Fungsi Sekretariat Daerah) :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah.
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Berdasarka Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar (2016)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIAT

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Sekretariat KORPRI

DINAS DAERAH

- 1) Dinas Kebersihan & Pertamanan
- 2) Dinas Kebudayaan & Pariwisata
- 3) Dinas Kelautan & Perikanan
- 4) Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
- 5) Dinas Kesehatan
- 6) Dinas Koperasi, UKM & Perindagtamben
- 7) Dinas Pekerjaan Umum
- 8) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
- 9) Dinas Pendidikan Nasional

- 10) Dinas Perhubungan & Kominfo
- 11) Dinas Pertanian & Kehutanan
- 12) Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

- 1) Inspektorat
- 2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- 3) Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas (BKBPL)
- 4) Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan
- 5) Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa/Kelurahan
- 6) Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Kantor Lingkungan Hidup
- 10) Kantor Pelayanan Terpadu & Penanaman Modal
- 11) Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah
- 12) Rumah Sakit Umum Daerah

PERANGKAT DAERAH

- 1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Kecamatan
- 3) Kelurahan

B. Analisis Statis Deskriptif

Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Selayar, peneliti menyebar sebanyak 75 rangkap kuesioner di 15 instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan yang di Kembalikan adalah sebanyak 69 rangkap kuesioner.

Jadi dengan demikian terdapat 6 Kuesioner yang tidak kembali. Gambaran yang diperoleh tentang karakteristik responden akan dilakukan dengan pengolahan data melalui perhitungan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan hasil analisis statistik deskriptif yang diperoleh dari jawaban responden atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

1. Jenis Kelamin

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 69 orang. Terdiri dari 35 Berjenis kelamin laki-laki atau sebesar 50,72%. Dan yang berjenis kelamin perempuan 34 orang atau sebesar 49,28% Dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1

Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	35	50,72%
2.	Perempuan	34	49,28%
Jumlah		69	100%

Sumber : data primer diolah 2016

2. Usia

Hasil olah data untuk kriteria responden berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel 4.2. Responden mayoritas berusia 36-45 tahun dengan persentase sebesar 49,28%. Sedangkan responden dengan usia diatas 55 tahun hanya 2 orang dengan persentase sebesar 2,89%. Responden dengan usia dibawah 25 tahun sebanyak 3 orang dengan persentase 4,35%. Usia 25-35 tahun sebanyak 14 orang atau sebesar 20,29% dan yang terakhir responden Usia 46-55 tahun sebanyak 16 orang dengan persentase 23,19%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tingkat Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 25 Tahun	3	4,35
2.	25-35 Tahun	14	20,29
3.	36-45 Tahun	34	49,28
4.	46-55 Tahun	16	23,19
5.	> 55 tahun	2	2,89
Jumlah		69	100

Sumber: data primer diolah 2016

3. Masa Kerja

Hasil dari data untuk kriteria masa kerja responden diketahui bahwa Responden dengan masa kerja 11-15 tahun menjadi yang paling dominan dengan 24 orang dengan persentase 34,78%. Sedangkan yang paling minim berada pada masa kerja 16-20 tahun yaitu sebanyak 3 orang atau sebesar 4,35%. Selanjutnya masa kerja < 5 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 8,69%. Pada masa kerja 5-10 tahun memiliki jumlah yang sama dengan masa kerja > 20 tahun yaitu sebesar 18 orang dengan persentase sebesar 26,09%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 5 Tahun	6	8,69
2.	5-10 Tahun	18	26,09
3.	11-15 tahun	24	34,78
4.	16-20 Tahun	3	4,35
5.	> 20 Tahun	18	26,09
Tahun		69	100

Sumber: data primer diolah 2016

4. Tingkat Pendidikan

Hasil olah data untuk kriteria tingkat pendidikan didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 yaitu sebanyak 55 orang atau sebesar 79,71%. Pada tingkat pendidikan Diploma 3 sebanyak 2 orang atau sebesar 2,90%. Selanjutnya tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang dengan persentase 4,35%. Dan yang terakhir tingkat pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 9 orang dengan persentase sebesar 13,04 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1.	SLTA	3	4,35
2.	D3	2	2,90
3.	S1	55	79,71
4.	S2	9	13,04
Jumlah		69	100

Sumber: data primer diolah 2016

5. Nama Instansi Responden

Hasil dari data untuk instansi tempat responden bekerja dimana peneliti menyebar kuesioner kepada 15 instansi pemerintah di kabupaten kepulauan selayar dan memberi 5 draft kuesioner di setiap instansi. Rata-rata setiap instansi mengembalikan kuesioner sebanyak 5 kuesioner atau lengkap dengan persentase 7,25 dari seluruh kuesioner, dan hanya 6 instansi pemerintah yang hanya mengembalikan 4 kuesioner yang berarti ada 1 yang tercecer dengan persentase 5,79 dari keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada instansi-instansi yang ada di kabupaten kepulauan selayar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Instansi Penelitian

No.	Nama Instansi	Jumlah	Persentase (%)
1.	Inspektorat	5	7,25
2.	Dinas Pekerjaan Umum	5	7,25
3.	Dinas Kependudukan	5	7,25
4.	Dinas ESDM	5	7,25
5.	Dinas Pertanian	5	7,25
6.	Kantor Pelayanan Terpadu	5	7,25
7.	Dinas Kesehatan	5	7,25
8.	Dinas Pendidikan Nasional	5	7,25
9.	Dinas Tata Ruang dan Kebersihan	5	7,25
10.	Badan Pemberdayaan Perempuan	4	5,79
11.	BAPPEDA	4	5,79
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	5,79
13.	DPPKAD	4	5,79
14.	Badan Kepegawaian Daerah	4	5,79
15.	Badan Pemberdayaan Masyarakat	4	5,79
Jumlah		69	100

Sumber: data primer diolah 2016

6. Statistik Deskripsi Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Perencanaan anggaran, Pengendalian Intern, Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Distribusi frekuensi atas jawaban responden dari hasil tabulasi skor data. Berdasarkan rumus yang digunakan yaitu:

$$C = \frac{5 - 1}{5} = 0,80$$

Hasil perhitungan rentang skala menunjukkan nilai 0,80, dengan demikian rentang skala 0,80 tersebut dapat dijelaskan nilai numeriknya sebagai berikut:

Tabel 4.6
Ikhtisar rentang skala variabel

Rentang	Perencanaan anggaran	Pengendalian Intern	Realisasi Anggaran	Akuntabilitas Keuangan Daerah
$1 \leq X < 1,80$	SR	SR	SR	SR
$1,80 \leq X < 2,60$	R	R	R	R
$2,61 \leq X < 3,40$	S	S	S	S
$3,41 \leq X < 4,20$	T	T	T	T
$4,21 \leq X < 5$	ST	ST	ST	ST

Keterangan :

SR : Sangat Rendah

R : Rendah

S : Sedang

T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

C. Deskripsi Variabel

Deskripsi variabel dari 69 responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JPA	69	26,00	40,00	35,3913	3,58189
JPI	69	29,00	45,00	38,1884	3,48642
JRA	69	22,00	30,00	26,2464	2,50532
JAK	69	34,00	55,00	46,5217	4,39120
Valid N (listwise)	69				

Tabel 4.7 menunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel 4.7, hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap perencanaan anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 40, mean (rata-rata) sebesar 35,39 dengan standar deviasi sebesar 3,582. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap variabel pengendalian intern menunjukkan nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 45, mean (rata-rata) sebesar 37,86 dengan standar deviasi sebesar 3,727. Untuk variabel realisasi anggaran, nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 26,25 dengan standar deviasi sebesar 2,050. dan untuk variabel akuntabilitas keuangan daerah, nilai minimum sebesar 34, nilai maximum sebesar 55, mean (rata-rata) sebesar 46,52 dengan standar deviasi sebesar 4,391.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tertinggi berada pada variabel akuntabilitas keuangan daerah yakni 46,52, sedangkan yang terendah adalah variabel realisasi anggaran yaitu 26,25. Untuk standar deviasi tertinggi berada pada variabel akuntabilitas keuangan daerah dan yang terendah adalah variabel realisasi anggaran.

D. Deskripsi Pernyataan

1. Analisis Deskriptif Variabel Perencanaan anggaran

Untuk tabel deskriptif Perencanaan Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai berikut, Nilai F merupakan jumlah responden yang memilih bobot jawaban dari setiap item pertanyaan dalam setiap variabel, skor merupakan hasil perkalian antara bobot pertanyaan dengan jumlah responden yang memilih bobot jawaban dari setiap item pertanyaan. Dibawah Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel perencanaan

anggaran terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Pernyataan responden mengenai Perencanaan anggaran

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
K1	F				36	33	69	4,47	ST
	Skor				144	165	309		
	%				52,17	47,83	100		
K2	F				46	23	69	4,33	ST
	Skor				184	115	299		
	%				66,67	33,33	100		
K3	F			1	33	35	69	4,44	ST
	Skor			3	132	175	307		
	%			1,45	47,83	50,72	100		
K4	F		3	7	32	27	69	4,20	T
	Skor		6	21	128	135	290		
	%		4,35	10,14	46,38	39,13	100		
K5	F		1	3	27	38	69	4,47	ST
	Skor		2	9	108	190	309		
	%		1,45	4,35	39,13	55,07	100		
K6	F			3	31	35	69	4,46	ST
	Skor			9	124	175	308		
	%			4,35	44,93	50,72	100		
K7	F		2	2	29	36	69	4,43	ST
	Skor		4	6	116	180	306		
	%		2,90	2,90	42,03	52,17	100		
K8	F			2	30	37	69	3,11	T
	Skor			6	120	185	257		
	%			2,90	43,48	53,62	100		
Rata-Rata Keseluruhan								4,31	ST

Sumber : data primer diolah 2016

Berdasarkan dari tabel 4.8 diatas dapat di ketahui bahwa persepsi responden mengenai perencanaan anggaran sangat tinggi yaitu di rata-rata 4,31. Pada pernyataan

pertama menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa rencana pembangunan jangka menengah itu menjabarkan mengenai visi misi dan program dari kepala daerah. Dengan mayoritas responden 33 memilih sangat setuju dan 36 lainnya memilih setuju. Pernyataan kedua menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh daerah harus terukur mengenai sistem pendanaannya. Dengan mayoritas responden 46 memilih setuju dan sisanya memilih sangat setuju. Pada pernyataan ketiga 1 orang responden memilih ragu-ragu sementara 33 orang memilih setuju dan 35 orang memilih sangat setuju.

Pernyataan keempat mayoritas memilih setuju sebanyak 32 dan sisanya 27 orang sangat setuju, 7 orang memilih ragu-ragu dan 3 orang memilih tidak setuju ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana kerja anggaran harus di dasarkan pada program yang telah disepakati . Pernyataan kelima dimana mayoritas memilih sangat setuju sebanyak 38 orang, setuju sebanyak 27 orang, ragu-ragu sebanyak 3 orang dan tidak setuju sebanyak 2 orang. Pernyataan keenam dengan mayoritas yang sangat setuju sebanyak 35 orang, setuju sebanyak 31 orang dan ragu-ragu sebanyak 3 orang. Pertanyaan ketujuh mayoritas memilih sangat setuju sebanyak 36 orang, setuju sebanyak 29 orang, dan sisanya tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa para responden menyetujui mengenai pertanggung jawaban dari perencanaan anggaran ketika anggaran itu terealisasi. Dan pernyataan terakhir mayoritas responden memilih sangat setuju sebanyak 37 orang, setuju sebanyak 30 orang dan ragu-ragu sebanyak 2 orang.

2. Analisis Deskriptif Variabel Pengendalian Intern

Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel pengendalian Intern terdiri dari 9 (Sembilan) item pernyataan, sembilan item pernyataan itu menguraikan

mengenai hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Pernyataan responden mengenai Pengendalian Intern

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
K1	F				29	40	69	4,57	ST
	Skor				116	200	316		
	%				42,03	57,97	100		
K2	F		2	7	31	29	69	3,60	T
	Skor		4	21	124	145	249		
	%		2,90	10,14	44,93	42,03	100		
K3	F			7	37	25	69	4,26	ST
	Skor			21	148	125	294		
	%			10,15	53,62	36,23	100		
K4	F		3	6	40	20	69	4,11	T
	Skor		6	18	160	100	284		
	%		4,35	8,70	57,97	28,98	100		
K5	F			1	48	20	69	4,27	ST
	Skor			3	192	100	295		
	%			1,45	69,57	28,98	100		
K6	F		3	2	41	23	69	4,21	ST
	Skor		6	6	164	115	291		
	%		4,35	2,90	59,42	33,33	100		
K7	F		5	2	49	13	69	4,01	T
	Skor		10	6	196	65	277		
	%		7,25	2,90	71,01	18,84	100		
K8	F			2	46	21	69	4,27	ST
	Skor			6	184	105	295		
	%			2,90	66,67	30,43	100		
K9	F		11	1	44	13	69	3,85	T
	Skor		22	3	176	65	266		
	%		15,94	1,45	63,77	18,84	100		
Rata-Rata Keseluruhan								4,12	T

Sumber : data primer diolah 2016

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada pernyataan pertama mayoritas memilih sangat setuju sebanyak 40 orang dan yang menyatakan setuju sebanyak 29 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui harus adanya pembagian wewenang yang jelas dalam satu instansi. Pernyataan kedua dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 31 orang, sangat setuju 29 orang, ragu-ragu 7 orang dan tidak setuju sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa responden membenarkan adanya kode etik dalam instansi dan diketahui oleh semua aparat dalam instansi tersebut. Pernyataan ketiga mayoritas memilih setuju sebanyak 37 orang, sangat setuju 25 orang dan yang ragu-ragu sebanyak 7 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa dalam pengawasan intern dibutuhkan staf yang kompeten dan dapat dipercaya serta tanggap dengan perubahan.

Pernyataan keempat dimana pernyataannya mengenai adanya pertanggung jawaban mengenai pengendalian internal instansi ketika anggaran telah terealisasi. Mayoritas responden memilih setuju sebanyak 40 orang, sangat setuju sebanyak 20 orang, ragu-ragu 6 orang dan tidak setuju 3 orang. Pernyataan kelima dengan mayoritas memilih setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju 20 orang dan sisanya memilih ragu-ragu sebanyak 1 orang. Dapat diketahui bahwa dalam satu instansi harus ada pemisahan tugas agar pengawasan dapat berjalan efektif. Pernyataan keenam mayoritas memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat setuju 23 orang, ragu-ragu 2 orang dan tidak setuju 3 orang. Dan dapat disimpulkan bahwa Pengendalian internal memang digunakan untuk mengawasi dalam perealisasi anggaran. Pernyataan ketujuh mayoritas memilih setuju sebanyak 49 orang, sangat setuju 13 orang, ragu-ragu 2 orang dan tidak setuju 5 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa harus ada pengawasan mengenai kualitas pengendalian intern yang

akan dilaporkan pada akhir periode. Pertanyaan kedelapan dengan mayoritas memilih setuju sebanyak 46 orang, sangat setuju 21 orang dan ragu-ragu 2 orang. Pernyataan kesembilan dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 44 orang, sangat setuju 13 orang, ragu ragu 1 orang, dan tidak setuju sebanyak 11 orang. Menunjukkan bahwa pengendalian internal akan berguna ketika ada ketidak sesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran.

3. Analisis Deskriptif Variabel Realisasi Anggaran

Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel Realisasi Anggaran terdiri dari 6 (Enam) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Pernyataan responden mengenai Realisasi anggaran

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
K1	F				35	34	69	4,49	ST
	Skor				140	170	310		
	%				50,72	49,28	100		
K2	F			2	32	35	69	3,97	T
	Skor			6	128	140	274		
	%			2,90	46,38	50,72	100		
K3	F			1	41	27	69	4,37	ST
	Skor			3	164	135	302		
	%			1,45	59,42	39,13	100		
K4	F		2	1	37	29	69	4,34	ST
	Skor		4	3	148	145	300		
	%		2,90	1,45	53,62	42,03	100		
K5	F			4	39	26	69	4,31	ST
	Skor			12	156	130	298		
	%			5,80	56,52	37,68	100		
K6	F			2	48	19	69	4,24	ST
	Skor			6	192	95	293		
	%			2,90	69,56	27,54	100		
Rata-Rata Keseluruhan								4,03	T

Sumber : data primer diolah 2016

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada item pernyataan pertama yang menyatakan bahwa setiap SKPD harus membuat mengenai laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Dan jumlah responden mayoritas memilih setuju sebanyak 35 orang dan sisanya sebanyak 34 orang memilih sangat setuju. Pernyataan kedua mayoritas responden memilih sangat setuju sebanyak 35 orang, setuju sebanyak 32 orang dan ragu-ragu sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa setiap instansi harus melaporkan realisasi anggaran sesuai fakta yang ada.

Pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD harus sesuai dengan SAP. Dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat setuju 27 orang dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. Pernyataan keempat dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 37 orang, sangat setuju 29 orang, ragu-ragu 1 orang dan tidak setuju adalah sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa responden menyadari bahwa bagian terpenting dalam pelaporan adalah bagian pertanggung jawabannya. Pernyataan kelima dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 39 orang, sangat setuju 26 orang dan yang memilih ragu-ragu 4 orang.

Pernyataan keenam dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju 19 orang dan ragu-ragu sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa pertanggung jawaban dalam pelaksanaan APBD harus sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada public.

4. Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

Hasil analisis deskriptif pernyataan dalam variabel Akuntabilitas Keuangan Daerah terdiri dari 11 (Sebelas) item pernyataan, yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Pernyataan responden mengenai Akuntabilitas Keuangan Daerah

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata	Ket
Bobot		1	2	3	4	5			
K1	F			1	46	22	69	4,30	ST
	Skor			3	184	110	297		
	%			1,45	66,67	31,88	100		
K2	F		1	1	46	21	69	4,26	ST
	Skor		2	3	184	105	294		
	%		1,45	1,45	66,67	30,43	100		
K3	F		3		53	13	69	4,10	T
	Skor		6		212	65	283		
	%		4,35		76,81	18,84	100		
K4	F	2	2	6	48	11	69	3,92	T
	Skor	2	4	18	192	55	271		
	%	2,90	2,90	8,70	69,56	15,94	100		
K5	F		3	5	41	20	69	4,13	T
	Skor		6	15	164	100	285		
	%		4,35	7,25	59,42	28,99	100		
K6	F		1	2	50	16	69	4,17	T
	Skor		2	6	200	80	288		
	%		1,45	2,90	72,46	23,19	100		
K7	F				43	26	69	4,37	ST
	Skor				172	130	302		
	%				62,32	37,68	100		
K8	F		1		40	28	69	4,34	ST
	Skor		2		160	140	300		
	%		1,45		57,97	40,58	100		
K9	F		3	1	44	21	69	4,20	T
	Skor		6	3	176	105	290		
	%		4,35	1,45	63,77	30,43	100		
K10	F				47	22	69	4,31	ST
	Skor				188	110	298		
	%				68,12	31,88	100		
K11	F		1	1	40	27	69	4,34	ST
	Skor		2	3	160	135	300		
	%		1,45	1,45	57,97	39,13	100		
Rata-Rata Keseluruhan								4,22	ST

Sumber : data primer diolah 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata responden memilih sangat setuju dengan jumlah keseluruhan 4,22. Pernyataan pertama mayoritas responden memilih setuju sebanyak 46, sangat setuju 22 orang, dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui visi misi instansi harus dijabarkan kedalam rencana strategi organisasi. Pernyataan kedua dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 46 orang, sangat setuju 20 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Menunjukkan bahwa pemerintah harus menyampaikan perencanaan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pernyataan ketiga dengan mayoritas responden memilih setuju 53 orang, sangat setuju sebanyak 13 orang, dan tidak setuju sebanyak 3 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui pemerintah daerah harus menyampaikan laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD. Pernyataan keempat dengan mayoritas memilih responden memilih setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju sebanyak 11 orang, ragu-ragu 6 orang, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Menunjukkan bahwa responden mengakui semua manfaat yang bernilai uang merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.

Pernyataan kelima yang menyatakan bahwa instansi harus melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 41 orang, sangat setuju sebanyak 20 orang, ragu-ragu sebanyak 5 orang dan tidak setuju sebanyak 3 orang. Pernyataan keenam dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 50 orang, sangat setuju sebanyak 16 orang, ragu-ragu sebanyak 2 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Menunjukkan bahwa instansi membuat laporan kepada atasan setiap program telah dilaksanakan. Pernyataan kedelapan dimana sebuah instansi harus melakukan pengecekan

terhadap jalannya program dengan mayoritas responden memilih setuju 43 orang, dan sangat setuju sebanyak 26 orang.

Pernyataan kedelapan dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 40 orang, Sangat setuju sebanyak 28 orang dan ragu-ragu sebanyak 1 orang. Menunjukkan bahwa Instansi harus melakukan pemantauan terhadap program yang terealisasi. Pernyataan kesembilan dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 44 orang, sangat setuju sebanyak 21 orang, ragu-ragu sebanyak 1 orang dan tidak setuju sebanyak 3 orang. Menunjukkan bahwa responden menyetujui LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program. Pernyataan kesepuluh dengan mayoritas responden memilih setuju sebanyak 47 orang dan sangat setuju sebanyak 22 orang. Menunjukkan bahwa Laporan keuangan daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dan pernyataan terakhir yang menyatakan bahwa laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diberikan kepada BPK. Mayoritas responden memilih setuju sebanyak 40 orang, Sangat setuju 27 orang, ragu-ragu 1 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang.

E. Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan berkaitan dengan proses pengukuran yang cenderung keliru. Apalagi dalam penelitian – penelitian ilmu sosial, atau variabel – variabel yang diteliti sifatnya lebih abstrak sehingga sulit untuk dilihat dan divisualisasikan. Konsep yang digunakan untuk mengukur kualitas data, yaitu :

1. Uji Validitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya indikator atau kuesioner dari masing-masing variabel. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan

untuk mengukur validitas yaitu *content validity*, *criterion-related validity* dan *construct validity* (Indriantoro dan Supomo, 2013:181). Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Nilai r hitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program spss dan outputnya bernama *corrected item correlation*. Sedangkan untuk mendapatkan r tabel dilakukan dengan tabel r *product moment*, yaitu menentukan $\alpha = 0,05$ kemudian $n = 69$ sehingga didapat nilai r tabel dua sisi sebesar 0,250 (69-2).

1. Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat ditentukan, apabila $r_{hitung} > r_{tabel} = \text{Valid}$ dan
2. Tingkat $r_{hitung} < r_{tabel} = \text{Tidak Valid}$. Hasil uji validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel
Perencanaan Anggaran

Pernyataan	<i>Corrected item total correlation (r_{hitung})</i>	r_{tabel}	Validitas
1	0,539	0,250	Valid
2	0,553	0,250	Valid
3	0,754	0,250	Valid
4	0,729	0,250	Valid
5	0,821	0,250	Valid
6	0,841	0,250	Valid
7	0,845	0,250	Valid
8	0,803	0,250	Valid

Sumber data: data primer, diolah 2016

Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel perencanaan anggaran menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dimana ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dinyatakan valid.

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel
Pengendalian Intern

Pernyataan	<i>Corrected item total correlation (r_{hitung})</i>	r_{tabel}	Validitas
1	0,547	0,250	Valid
2	0,630	0,250	Valid
3	0,666	0,250	Valid
4	0,808	0,250	Valid
5	0,792	0,250	Valid
6	0,647	0,250	Valid
7	0,665	0,250	Valid
8	0,631	0,250	Valid
9	0,476	0,250	Valid

Sumber data : data primer, diolah 2016

Tabel 4.13 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel pengendalian intern menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dimana Ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel diatas dinyatakan sudah valid atau sudah sesuai dengan ketentuan. Tabel 4.14 dibawah dapat dilihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel realisasi anggaran menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dimana diketahui bahwa ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel diatas dinyatakan vilid atau sudah sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.14
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel
Realisasi Anggaran

Pernyataan	<i>Corrected item total correlation</i> (r_{hitung})	r_{tabel}	Validitas
1	0,811	0,250	Valid
2	0,692	0,250	Valid
3	0,846	0,250	Valid
4	0,664	0,250	Valid
5	0,803	0,250	Valid
6	0,742	0,250	Valid

Sumber data : data primer, diolah 2016

Terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel realisasi anggaran menunjukkan hasil yang signifikan. Pada item *corrected total correlation* (r_{hitung}) pada tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa seluruh r_{hitung} dari poin pertama sampai keenam berada di atas nilai r_{tabel} .

Tabel 4.15
Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Variabel
Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pernyataan	<i>Corrected item total correlation</i> (r_{hitung})	r_{tabel}	Validitas
1	0,597	0,250	Valid
2	0,500	0,250	Valid
3	0,702	0,250	Valid
4	0,738	0,250	Valid
5	0,730	0,250	Valid
6	0,574	0,250	Valid
7	0,689	0,250	Valid
8	0,706	0,250	Valid
9	0,686	0,250	Valid
10	0,724	0,250	Valid
11	0,724	0,250	Valid

Sumber data : data primer, diolah 2016

Tabel 4.15 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing pertanyaan variabel akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan

bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$. Dimana diketahui bahwa ketika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dapat diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan dari variabel diatas di anggap valid atau sudah sesuai dengan ketentuan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*, yang diaplikasikan dengan program SPSS Ver. 22. Untuk uji reliabilitas instrument, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Dari hasil olah data dapat dilihat pada tabel 4.16

Tabel 4.16
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Standar Reliabilitas</i>	Keterangan
Perencanaan Anggaran	0,879	0,60	Reliabel
Pengendalian Intern	0,816	0,60	Reliabel
Realisasi Anggaran	0,846	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Daerah	0,875	0,60	Reliabel

Sumber data : data primer diolah 2016

Nilai *cronbach's alpha* pada tabel 4.16 diatas semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern, Realisasi Anggran dan Akuntabilitas Keuangan Daerah semua dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel dalam penelitian yang dilakukan di SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut uraiannya :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat normalitas model regresi, pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram dan normal p-p plot. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk lebih memberi keyakinan dan memberi hasil yang lebih handal dapat digunakan dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample Kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi Z sebesar $0,20 > 0,05$.

Tabel 4.17
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,48555015
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,059
	Negative	-,056
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

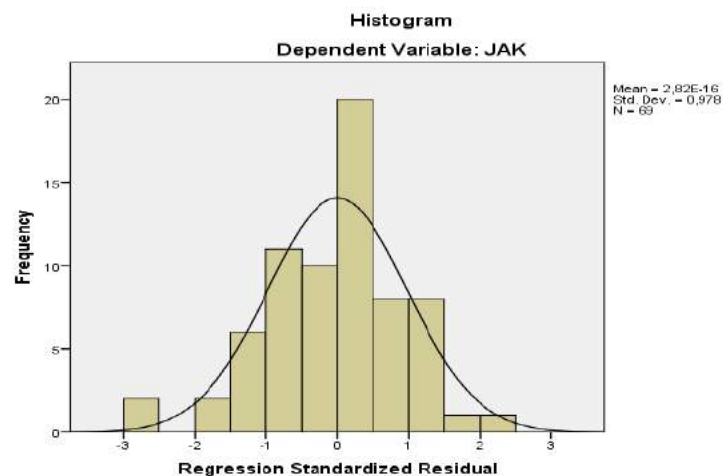
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber Data : Data Primer, diolah 2016

Bentuk grafik histogram pada gambar juga menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafik normal dan tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafik normal plot juga mendukung hasil pengujian dengan grafik histogram.

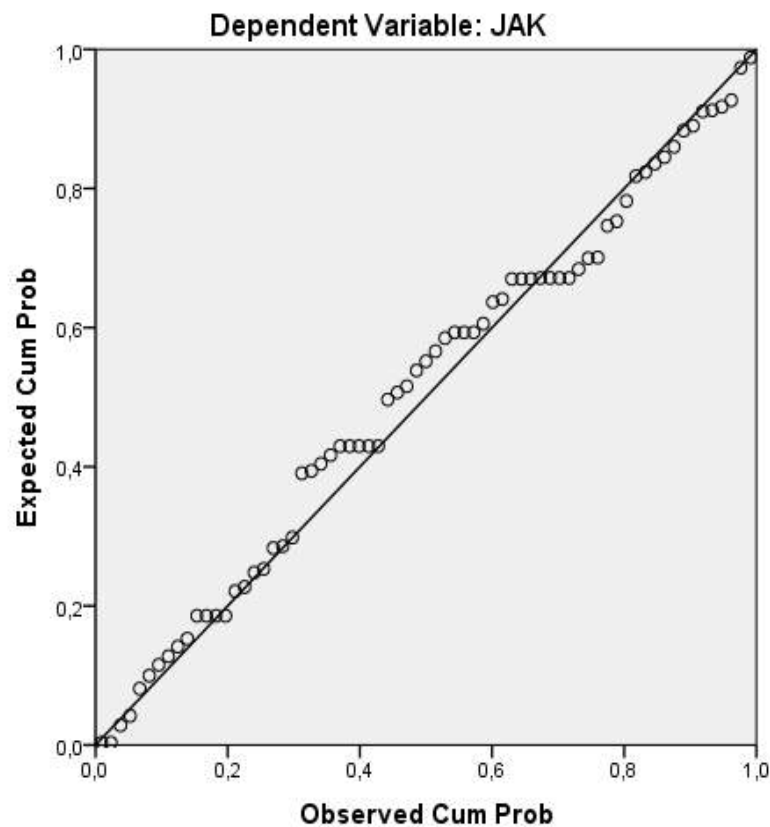
Grafik 4.1
Hasil Uji Normalitas – Grafik Histogram



Dapat dilihat bahwa titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Karena ketika titik-titik tersebut tidak menyebar di sekitar garis diagonal maka dinyatakan tidak memenuhi asumsi klasik.

Grafik 4.2
Hasil Uji Normalitas – Grafik Normal Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Multikololinearitas

Model regresi berganda yang baik adalah model regresi yang variabel –variabel bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari multikolinearitas. Deteksi adanya multikolinearitas dipergunakan nilai vif (*varian infalaction factor*),

bila nilai vif di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,10 berarti data bebas multikolinearita.

Tabel 4.18
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
JPA	,664	1,507
JPI	,703	1,423
JRA	,725	1,379

a. Dependent Variable: JAK

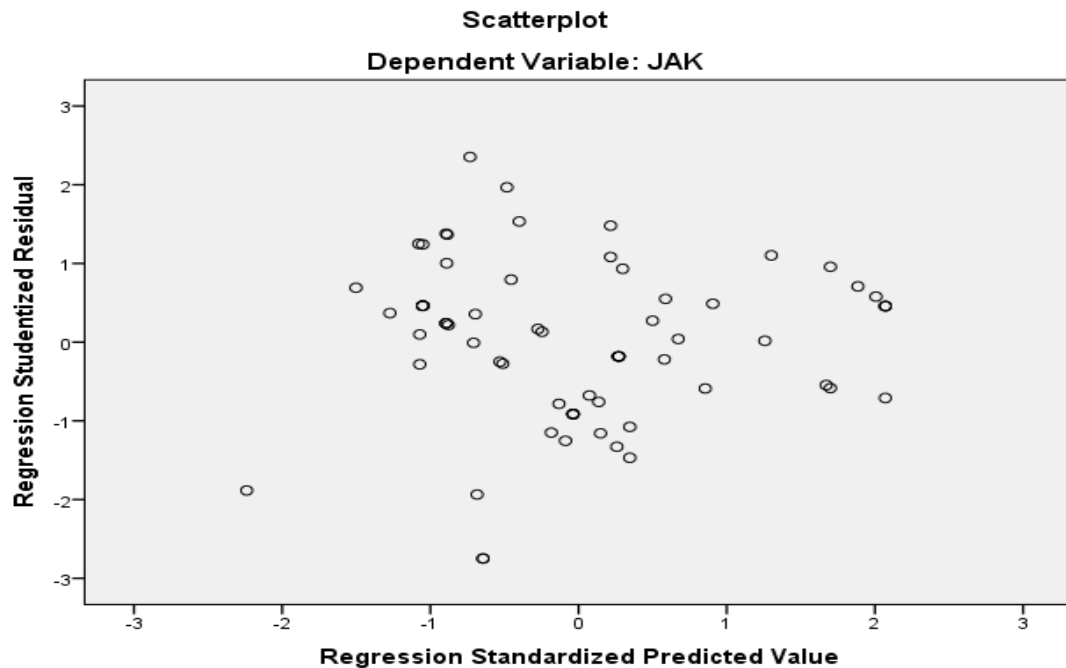
Sumber data : data primer diolah 2016

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.18 diatas, karena nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik Scatterplot penelitian ini terlihat menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Akuntabilitas Keuangan Daerah berdasarkan masukan variabel independennya (Perencanaan Anggaran, pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran).

Grafik 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



4. Hasil Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, selanjutnya pengujian yang dilakukan adalah uji hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen.

a. Regresi pertama

1. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau $R Square$ (R^2). Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,524 ^a	,275	,253	2,16514

a. Predictors: (Constant), JPI, JPA

Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel diatas nilai R² adalah 0,524 menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang “kuat”. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang kuat terhadap realisasi anggaran.

Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan R *square* sebesar 0,275, yaitu sebesar 27,5% dari realisasi anggaran dapat dijelaskan oleh variasi dari perencanaan anggran dan pengendalian intern sisanya sebesar 72,5% diterangkan oleh variabel lain. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara realisasi anggaran dengan variabel perencanaan anggaran dan pengendalian intern adalah cukup.

2. Hasil Uji simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel X₁ X₂ dan X₃ berpengaruh terhadap Y.

Tabel 4.20
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	117,415	2	58,707	12,523	,000 ^b
	Residual	309,397	66	4,688		
	Total	426,812	68			

a. Dependent Variable: JRA

b. Predictors: (Constant), JPI, JPA

Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 12,523 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya secara simultan, Perencanaan anggaran, pengendalian intern berpengaruh terhadap realisasi anggaran bisa diterima.

3. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel variabel Perencanaan Anggaran (X_1), pengendalian Internal (X_2), dan Realisasi Anggaran (X_3), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.21
Hasil Uji t Hitung

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,656	3,180		3,351	,001
JPA	,246	,085	,352	2,902	,005
JPI	,180	,087	,251	2,072	,042

a. Dependent Variable: JRA

Data primer diolah 2016

Tabel 4.21 menunjukkan variabel perencanaan anggaran memiliki t hitung sebesar 2,902 dengan nilai signifikansi 0.005. Dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari atau 0,05 yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. dan nilai t hitung > t tabel. Variabel pengendalian intern memiliki t hitung sebesar 2,072 dengan nilai signifikansi 0.042. Dimana nilai signifikansinya lebih kecil dari atau 0,05 yang menunjukkan bahwa

pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi anggaran. dan nilai thitung > t tabel.

Untuk pengujian hipotesis selanjutnya, data dilihat dari hasil uji koefisiendeterminasi (R^2). Apabila nilai adjusted R square yang mendekati satu maka variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Tabel ini memperlihatkan hasil uji koefisien determinasi :

b. Regresi kedua

1. Koefisien determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Peneliti melakukan pengujian koefisien korelasi atau R dan pengujian koefisien determinasi atau *R Square* (R^2). Untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi dan determinasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,803 ^a	,645	,629	2,67635

a. Predictors: (Constant), JRA, JPI, JPA

Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, nilai R adalah 80,3% menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi yang (sangat kuat) atau berpengaruh karena berada pada interval 0,80 – 1. Hal ini

menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran berpengaruh sangat kuat atau berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah di Kabupaten kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai Adjusted R *square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R *square* sebesar 0,645, hal ini berarti bahwa 64,5% Akuntabilitas Keuangan Daerah dapat dipengaruhi oleh variasi variabel independen dan sisanya sebesar 35,5% (100% - 64,5%) dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

2. Hasil Uji simultan (Uji F)

Uji simultan atau uji f dilakukan untuk menguji apakah variabel perencanaan anggaran (X_1), Pengendalian intern (X_2), realisasi anggaran (X_3) bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y).

Tabel 4.23
Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	845,632	3	281,877	39,353	,000 ^b
	Residual	465,585	65	7,163		
	Total	1311,217	68			

a. Dependent Variable: JAK

b. Predictors: (Constant), JRA, JPI, JPA

Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa dalam pengujian menunjukkan hasil F hitung sebesar 39,353 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

Artinya secara simultan, Perencanaan anggran, pengendalian intern dan realisasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah bisa diterima.

3. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel variabel Perencanaan Aggaran (X_1), pengendalian Internal (X_2), dan Realisasi Anggaran (X_3), secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Nilai t hitung dapat dilihat pada tabel 4.19 sebagai berikut :

Tabel 4.24
Hasil Uji t Hitung

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,555	4,252		,366	,716
JPA	,028	,111	,023	,252	,802
JPI	,654	,111	,519	5,889	,000
JRA	,724	,152	,413	4,758	,000

a. Dependent Variable: JAK

Data primer diolah 2016

Berdasarkan dari hasil uji parsial (uji t) diatas diketahui bawa nilai t hitung variabel X_1 adalah tidak signifikan dengan tingkat signifikan $0,802 > 0,05$. Nilai t hitung untuk variabel X_2 adalah positif dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Dan nilai t hitung untuk variabel X_3 adalah positif dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Pengujian variabel intervening menggunakan *path analysis* atau sering disebut analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menentukan pola hubungan antara tiga atau lebih variabel. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui apakah realisasi

anggaran merupakan variabel yang dapat memediasi hubungan antara perencanaan anggaran dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

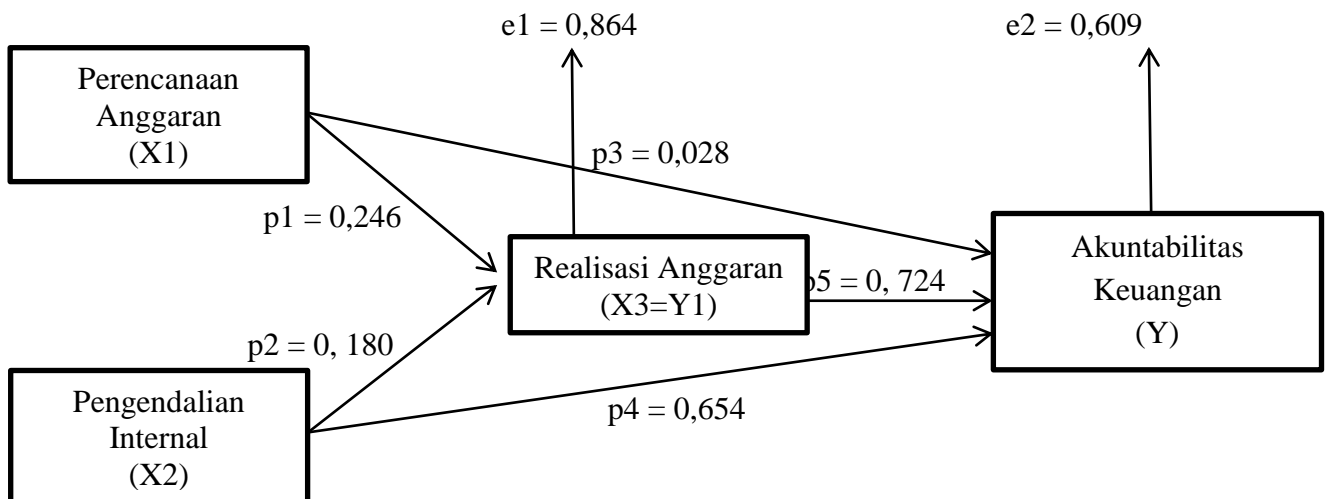
Pada *output* persamaan pertama nilai *unstandardized* Beta perencanaan anggaran sebesar 0,246 dengan tingkat signifikan 0,005 yang berarti berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Nilai koefisien *unstandardized* Beta 0,246 merupakan nilai path atau jalur p1. Nilai *unstandardized* Beta pengendalian intern sebesar 0,180 dengan tingkat signifikan 0,042 yang berarti berpengaruh terhadap realisasi anggaran. Nilai koefisien *unstandardized* Beta 0,180 merupakan nilai path atau jalur p2.

Pada *output* persamaan kedua nilai *unstandardized* Beta perencanaan anggaran sebesar 0,028 dengan tingkat signifikan 0,802 yang berarti tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Nilai koefisien *unstandardized* Beta 0,802 merupakan nilai path atau jalur p3. Nilai *unstandardized* Beta pengendalian intern sebesar 0,654 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Nilai koefisien *unstandardized* Beta 0,654 merupakan nilai path atau jalur p4. Nilai *unstandardized* Beta realisasi anggaran sebesar 0,724 dengan tingkat signifikan 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Nilai koefisien *unstandardized* Beta 0,724 merupakan nilai path atau jalur p5.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi persamaan pertama diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,725, maka besarnya nilai $e1 = \sqrt{0,747} = 0,864$ Nilai $e1$ adalah jumlah varian variabel realisasi anggaran atau variabel mediasi yang tidak dijelaskan oleh variabel independen. Berdasarkan hasil koefisien determinasi persamaan kedua diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,645, maka besarnya nilai $e2 = \sqrt{0,371} = 0,609$ Nilai $e2$ adalah jumlah varian variabel akuntabilitas keuangan yang tidak dijelaskan

oleh variabel perencanaan anggaran, pengendalian intern dan realisasi anggaran.

Berikut adalah model analisis jalur.



Pengaruh langsung :

Perencanaan anggran = 0,028

Pengendalian intern = 0,654

Pengaruh tidak langsung

Perencanaan anggaran = 0,178

Pengendalian intern = 0,130

Hasil uji pengaruh intervening variabel perencanaan anggaran dan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 + X_1 + \beta_2 + X_2 + e_1$$

$$= 10,656 + 0,246 x_1 + 0,180 x_2 + 0,864$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 + X_1 + \beta_2 + X_2 + \beta_3 + X_3 + e_2$$

$$= 1,555 + 0,028 x_1 + 0,653 x_2 + 0,742 x_3 + 0,609$$

Pada hasil uji pengaruh intervening antara perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggran sebagai variabel intervening ditemukan bahwa pengaruh langsung antara variabel perencanaan dengan realisasi adalah sebesar 0,028 sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,178. Pada hasil uji intervening antara pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan dengan realisasi anggran sebagai variabel intervening ditemukan bahwa pengaruh langsung pengendalian terhadap akuntabilitas adalah sebesar 0,654 sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0,130. Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan pada tabel dibawah ini:

No	Variabel	Direct	Indirect	Total	Kesimpulan
1	Perencanaan anggaran	0,028	0,178	0,206	Realisasi anggaran sebagai variabel intervening dengan direct lebih kecil dari indirect
2	Pengendalian intern	0,654	0,130	0,784	Realisasi anggaran sebagai variabel intervening dengan direct lebih besar dari indirect

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketika *indirect effect* lebih besar dari *direct* maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut bisa dikatakan sebagai variabel intervening. Pada variabel perencanaan anggaran memiliki nilai *direct* sebesar 0,028 dan nilai *indirect* sebesar 0,078 berarti dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dapat menjadi variabel intervening. Pada variabel pengendalian intern memiliki nilai *direct* sebesar 0,654 dan *indirect* sebesar 0,130 maka dapat disimpulkan bahwa

realisasi anggaran merupakan variabel intervening dimana nilai *direct* lebih besar dari *indirect*.

Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat di berikan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh Perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan signifikansi 0,846 diatas dari batas tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak diterima. Walaupun perencanaan anggaran ini penting dalam proses penganggaran akan tetapi pada penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan dengan akuntabilitas keuangan daerah. Memang dalam hal penganggaran sangat penting adanya perencanaan karena suatu pekerjaan yang akan dilakukan harus di rencanakan terlebih dahulu.

Akan tetapi dalam proses penganggaran atau perencanaan anggaran ketika akan di pertanggung jawabkan harus melalui realisasi terlebih dahulu, karena sebuah perencanaan akan dikatakan baik ketika realisasinya juga baik. Konsisten dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh. Friska (2014) menyatakan bahwa Akuntabilitas melalui anggaran meliputi perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan anggran dapat dipertanggung

jawabkan ketika telah dibuatkan laporan realisasi anggran yang menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban.

2. Pengaruh Pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh pengendalian Intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah positive dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000 dibawah dari tingkat signifikasi 0.05. Ini berarti pengendalian intern daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua mengenai pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kaltsum dan Abd. Rahman (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Pernyataan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aristanti widyaningsih (2011) yang menyatakan terdapat hubungan antara pengendalian internal dengan akuntabilitas keuangan daerah.

Pengendalian Intern yang dimaksudkan disini adalah bagaimana cara suatu instansi melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu program, dan ketika program ini tidak berjalan dengan semestinya maka akan dilakukan beberapa evaluasi. Jadi pengendalian internal ini dijadikan sebagai suatu badan pengawasan terhadap berjalannya suatu program dalam instansi pemerintah. Pengendalian intern ini sangat penting dalam suatu instansi untuk mengawasi dan melaksanakan evaluasi untuk program-program yang berjalan sehingga program dapat terealisasi dengan baik.

3. Pengaruh Perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil uji t pada regresi pertama menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran dengan tingkat disignifikansi 0,005 dan setelah di lakukan perhitungan dengan persamaan yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara perencanaan dengan akuntabilitas dengan nilai *direct* 0,028 dan nilai *indirect* 0,178. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perencanaan anggran memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penganggaran di daerah, dimana perencanaan ini di jadikan titik tumpuh dikeluarkannya anggaran. Berlakunya otonomi daerah sekarang ini mewajibkan seluruh daerah untuk mempertanggung jawabkan hasil pembangunan daerahnya berupa laporan pertanggung jawaban.

Pada laporan pertanggung jawaban inilah kita melihat apa tujuan dikeluarkannya anggaran tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak dan apakah yang dianggarkan sudah sesuai dengan yang direalisasikan atau tidak. Disinilah peranan penting realisasi anggaran dalam memediasi antara tahap perencanaan dengan tahap pertanggungjawaban. Dimana kita ketahui bahwa ketika perencanaan anggaran bagus maka akan menghasilkan realisasi anggaran yang maksimal yang kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat jadi kedua variabel ini dapat dikatakan memiliki hubungan yang kuat.

Pada persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai pengaruh langsung adalah 0,028 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,178, dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung maka dapat dikatakan bahwa variabel

realisasi anggaran bisa dijadikan sebagai variabel intervening. Hal ini ditekankan pula oleh Friska (2014) yang menyatakan bahwa akuntabilitas anggaran meliputi proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan anggaran. Dan sesuai dengan hasil penelitian dari Friska (2014) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran, implementasi dan pelaporan anggaran berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas instansi daerah.

4. Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh pengendalian intern terhadap realisasi anggaran adalah signifikan dengan tingkat signifikansi 0,042 dan setelah dilakukan perhitungan dengan persamaan yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara pengendalian intern dengan akuntabilitas dengan nilai *direct* 0,654 dan nilai *indirect* 0,130. memang untuk menciptakan realisasi yang maksimal dibutuhkan sebuah pengendalian atau sebuah pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dalam tahap perencanaan hingga perealisasiannya. Olehnya itu memang betul ketika kedua variabel ini dikatakan berhubungan karena jika pengawasan anggaran dilaksanakan dengan baik maka akan meminimalisasi terjadinya penyalahgunaan anggaran yang akan menghasilkan realisasi yang sesuai dengan perencanaannya maka akan tercipta pula akuntabilitas keuangan yang baik di daerah.

Pada persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai pengaruh langsung adalah sebesar 0,654 dan pengaruh tidak langsung adalah 0,130 yang berarti pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung maka variabel realisasi anggaran dapat dijadikan sebagai variabel intervening. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang

dilakukan oleh Muhanafiah (2015) yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan realisasi anggaran.

5. Pengaruh Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah positive dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000. Ini berarti realisasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berarti hipotesis yang ketiga mengenai pengaruh realisasi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah dapat diterima. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfian Rozaki (2012) yang menyatakan bahwa realisasi anggaran pemerintah daerah berpengaruh positive dan signifikan terhadap pertanggung jawaban keuangan daerah.

Realisasi anggaran yang dimaksud adalah Seberapa besar atau seberapa banyak program yang bisa di realisasikan oleh pemerinta sesuai dengan apa yang direncanakan ini. Diketahui bahwa belakangan ini banyak program yang tidak terealisasi dengan baik oleh karena banyaknya permasalahan dalam daerah, baik itu dari segi waktu maupun penyelewengan dana. Realisasi anggaran ini akhirnya akan dibuatkan berupa Laporan Realisasi anggaran yang membahas mengenai berapa banyak program yang telah di rencanakan dan berapa yang terealisasi serta berapa selisih kurang atau lebih antara apa yang direncanakan dengan apa yang terealisasi.

Jadi sudah dipastikan bahwa realisasi ini pasti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas karena dalam pertanggungjawaban keuangan suatu daerah harus ada laporan realisasi anggaran. Yang mana laporan ini akan menjadi pelengkap dalam laporan pertanggung jawaban daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga variabel yaitu Perencanaan anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran. Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 tidak diterima.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara perencanaan dengan akuntabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima.
4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa realisasi anggaran dapat memediasi antara pengendalian intern dengan akuntabilitas. Hasil ini menunjukkan hipotesis 4 diterima.
5. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t), menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 5 diterima.

6. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji F), menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran, pengendalian intern dan realisasi anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa diterima.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah uraikan pada bab pembahasan, maka implikasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dikabupaten selayar dari proses perencanaan, Pengendalian dan realisasinya akan akan memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan di daerah akan lebih diutamakan. Pemerintah tidak hanya mementingkan dirinya sendiri ataupun memperkaya dirinya sendiri.
2. Penyelenggaran otonomi daerah yang baik dilandaskan pada pertanggung jawaban keuangan yang baik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah diambil, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pada Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membah variabel X atau mengganti variabel X baru yang berkaitan dengan variabel Y.
2. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki sistem yang ada agar apa yang di inginkan dapat di realisasikan dengan semestinya.

3. Dalam Penelitian ini peneliti mengalami keterbatasan waktu yang membuat peneliti hanya sanggup meneliti 15 SKPD. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat meneliti keseluruhan SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Asak, P. Rani Adnyani. 2014. Kemampuan Asimetri Informasi, Ketidakpastian Lingkungan, Budget Emphasis, dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi Terhadap Partisipasi Anggaran pada Budgetary Slack (Studi Kasus pada SKPD Di Kabupaten Badung). *Tesis*. Universitas Udayana Denpasar.
- Asikin, Decky Firmansyah. 2014. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Basri, Ramlah. 2013. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No.4.
- Dewi, Komang Sartika DKK. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen Volume 2*.
- Espinoza. 2014. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fatmala, Juanita. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Ferawati, Galuh. 2011. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Pt. Askes (Persero) Cabang Kediri). *Skripsi*. Universitas Jember.
- Friska, Indriyani Yulia. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi). Universitas Jambi.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Bp Undip.

- Hehanussa, Salomi j. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Sultan Agung Islamic University.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodelogi penelitian bisnis*. Yogyakarta : BPFE.
- Kaltsum Ummu. Abdul Rohman. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Mardiasmo. 2009. “*Akuntansi Sektor Publik*”, Cetakan ke empat, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muhadjam, Angraeni s. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus Pada Dppkad Kabupaten Gorontalo Utara). Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhanafiah, Rizal Fadilah. 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran. *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Nugrohowati, Anik. 2015. Evaluasi Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Pemerintah Daerah Istimawa Yogyakarta. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.
- Parura, Sесilia Nova. 2015. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran. *Tesis*. Universitas Gajah Mada.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Skripsi*. Universitas Brawijaya.
- Riansah, Lira azhimatinnur. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi dan Kecukupan Anggaran Sebagai Variabel Moderating. (Studi di Instansi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Rozaki, Arfian. 2012. Analisis Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Otonomi Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

- Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 2, No. 2*.
- Saleba, Sitti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sembiring, Benar Baik. 2009. Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada Bpm-Pd Provinsi Sulawesi Utara. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Sudaryanti, Dwi. 2013. Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01*.
- Sufiyanti, Ana. 2007. Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Kas Terhadap Likuiditas Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiharto. 2013. Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas Organisasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Jambi. *Alumni Magister Ilmu Akuntansi*. Universitas Jambi.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sulaeman. 2012. Analisis Prosedur Pengendalian Intern Piutang Usaha Pada Astra Credit Companies Cabangmakassar. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Tamesoleng, Adelstin. 2015. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol.3 ,No.1*.
- Ulfa, Farida. 2008. Peranan Anggaran Sebagai Salah Satu Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Studi Pada Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Malang.

- Urusi, Nirwanto. 2010. Studi Proses Penyusunan Anggaran Daerah, Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- Wahidah N. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Wahyunengseh. Rutina Dwi. 2016. Patologi Akuntabilitas Sosial. *Disertasi*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta..
- Wicaksono, Widi Cahyo. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Intern di Sektor Pemerintahan (Persepsi Pegawai Pada Dinas-Dinas Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Yandra, Febie.2010. Analisis Perencanaan dan Penganggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Tahun 2006-2010

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Kuesioner

KUESIONER

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
DENGAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING
(Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)**



Oleh :

ANDYRWANTO

10800111019

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

Selayar, Februari 2016

Perihal : Permohonan untuk Mengisi Kuesioner

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wb. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh perencanaan anggaran dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan daerah dengan realisasi anggaran sebagai variabel intervening”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penulis memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner yang penulis lampirkan pada surat ini. Jawaban bapak/ibu pada kuisisioner ini akan penulis gunakan untuk mengetahui. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Internal dan Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. Data yang penulis peroleh dari bapak/ibu hanya akan penulis gunakan untuk kepentingan akademis dan akan dijaga kerahasiaannya.

Penulis menyadari kesibukan dan keterbatasan waktu yang bapak/ibu miliki. Namun, penelitian ini tidak dapat penulis lakukan tanpa bantuan bapak/ibu. Oleh karena itu penulis sangat memohon kesediaan bapak/ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner penelitian ini.

Demikian permohonan ini penulis ajukan, atas bantuan bapak/ibu penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Hormat saya
Peneliti,

Andyrwanto
Nim. 10800111019

KUESIONER

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Untuk mengisi daftar pertanyaan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden cukup memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia yang menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i Responden. Setiap pertanyaan membutuhkan hanya satu jawaban.

Kriteria jawaban:

- 1. STS = Sangat Tidak Setuju
- 2. TS = Tidak Setuju
- 3. RR = Ragu-Ragu
- 4. S = Setuju
- 5. SS = Sangat Setuju

B. Identitas Responden

Nama Instansi : _____

Nama Responden : _____

Jenis Kelamin : _____

Umur : _____

Pendidikan Terakhir : _____

Jabatan : _____

Lama Bekerja : _____

NO	PERNYATAAN					
Perencanaan Anggaran		STS	TS	RR	S	SS
1.	Dokumen RPJMD menjabarkan mengenai visi misi dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
2.	RKPD memuat mengenai Kerja yang terukur dan pendanaannya.					
3.	SKPD dalam hal perencanaan anggaran mengikuti KUA dan PPAS dalam penyusunan RKA-SKPD.					
4.	Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.					
5.	Dalam penyusunan RKA_SKPD memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka mencapai prestasi kerja.					
6.	Dalam penyusunan RKA_SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati Antara Pemerintah, DPRD dan SKPD itu sendiri.					
7.	Rencana Anggaran akan di pertanggungjawabkan ketika telah terealisasi.					
8.	Apabila pada saat pertanggung jawaban ternyata di temukan ketidak sesuaian antara perencanaan dan realisasi maupun perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan maka pihak pemeriksa harus memeriksa bagian perencanaan anggaran.					

NO	PERNYATAAN					
Pengendalian Internal		STS	TS	RR	S	SS
1.	Dalam instansi harus ada pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas.					
2.	Instansi memiliki kode etik tertulis dan semua aparat mengetahuinya.					
3.	Satuan pengawasan intern terdiri dari staf yang kompeten, dapat dipercaya dan tanggap dengan					

	perubahan.					
4.	Pengendalian yang ada harus di pertanggung jawabkan ketika anggaran telah terealisasi.					
5.	Adanya penetapan kebijakan pemisahan tugas yang memadai agar proses pengawasan dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.					
6.	Pengendalian intern bertujuan untuk mengawasi perealisasi anggaran dan akan di minta pertanggung jawaban atas tugasnya di akhir periode.					
7.	Adanya pengawasan untuk menilai kualitas pengendalian intern yang kemudian akan di laporkan di akhir periode.					
8.	Adanya pengawasan secara terus menerus dan periodic.					
9.	Pengendalian intern akan berguna ketika pada akhir periode ternyata ada ketidak sesuaian antara anggaran yang di tetapkan dengan anggaran yang terealisasi.					

NO	PERNYATAAN					
Realisasi Anggaran		STS	TS	RR	S	SS
1.	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
2.	Setiap instansi harus melaporkan hasil dari realisasi anggarannya sesuai fakta dan kenyataan yang ada dalam instansi.					
3.	Laporan Keuangan SKPD dan Pemda Yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LO, LPE, LPSAL, LRA, Neraca dan Catatan atas laporan Keuangan.					
4.	Bagian yang terpenting dari pelaporan adalah pertanggungjawabannya.					
5.	Realisasi Anggaran nantinya akan dibuatkan laporan realisasi anggran (LRA) yang menjadi bagian dari laporan pertanggung jawaban.					

6.	Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda untuk pertanggungjawaban pada publick.					
----	---	--	--	--	--	--

NO	PERNYATAAN					
Akuntabilitas Keuangan Daerah		STS	TS	RR	S	SS
1.	Visi dan misi instansi harus di jabarkan ke dalam rencana strategik organisasi.					
2.	Pemerintah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.					
3.	Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD.					
4.	Semua manfaat yang bernilai uang merupakan pendapatan daerah dan dianggarkan dalam APBD.					
5.	Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					
6.	Membuat laporan pada atasan setiap progran telah dilaksanakan.					
7.	Melakukan pengecekan terhadap jalannya program.					
8.	Melakukan pemantauan terhadap program yang terealisasi.					
9.	LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					
10.	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.					
11.	Laporan keuangan SKPD di review oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK.					

Lampiran 2 : Data Hasil Penelitian

Perencanaan Anggaran								
NO	PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8
1	5	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	4	3	3	3	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	3	4
8	4	4	4	3	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3
11	4	4	5	3	4	5	5	5
12	4	4	5	3	4	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	5	5
14	5	5	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5	5	5
16	5	5	5	2	4	4	4	4
17	5	5	5	4	5	5	5	5
18	4	5	5	5	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	5	5	4	4	4	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5
22	4	4	5	4	4	5	4	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	4	5	5	5	5	5	5
27	5	4	5	5	5	5	5	5
28	5	4	5	5	5	5	5	5
29	5	4	5	5	5	5	5	5
30	5	4	5	5	5	5	5	5
31	5	5	4	3	3	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4

33	4	4	4	2	2	4	2	4
34	4	4	4	4	5	4	4	4
35	5	5	5	4	5	5	5	5
33	4	4	4	2	2	4	2	4
34	4	4	4	4	5	4	4	4
35	5	5	5	4	5	5	5	5
36	5	4	4	4	4	4	4	4
37	5	5	5	5	5	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	5	5	5	5	5	5
40	4	4	4	5	5	4	4	4
41	4	4	4	4	5	5	5	5
42	4	4	4	4	5	5	5	5
43	4	4	4	4	5	5	5	5
44	4	4	4	4	5	5	5	5
45	4	4	4	4	5	5	5	5
46	4	4	4	4	5	5	5	5
47	5	5	5	4	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5	5	5	5
49	4	4	4	4	3	3	2	4
50	5	4	4	4	4	4	5	5
51	5	5	4	4	4	5	4	5
52	5	5	5	4	4	4	5	4
53	5	5	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4
56	5	4	4	4	5	4	4	4
57	5	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	5	5	5	5	5	5
59	4	4	5	5	5	5	5	5
60	4	4	5	5	5	5	5	5
61	4	4	5	5	5	5	5	5
62	5	4	5	2	4	4	3	3
63	5	5	5	5	5	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4	4	4

66	5	4	4	4	4	4	4	4
67	5	4	4	4	4	4	4	4
68	4	5	4	3	5	4	5	5
69	4	4	4	3	5	3	4	4

Pengendalian Intern									
NO	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7	PI8	PI9
1	4	4	4	4	4	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	4	4	5	5
3	4	3	4	4	4	4	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	4	3	4	4	4	4	4	4	4
7	4	3	4	4	4	4	4	4	3
8	4	4	4	4	4	5	4	4	4
9	5	5	4	4	4	5	4	4	4
10	4	4	5	4	4	5	4	4	4
11	4	4	3	3	4	4	4	4	4
12	4	4	3	3	4	4	4	4	4
13	5	3	3	3	4	4	4	5	4
14	5	3	3	3	4	4	4	5	4
15	5	3	3	3	4	4	4	5	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	5	4	4	4	4	4	4	4
18	5	4	4	2	4	2	2	5	2
19	5	4	4	4	4	4	4	4	4
20	5	5	4	4	4	4	4	5	4
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5
22	4	4	5	4	4	5	2	4	4
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	2	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	4	4	4	4	4	2
27	5	5	5	4	4	4	4	4	2
28	5	5	5	4	4	4	4	4	2

[illegible]

65	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	4	2	3	4	5	4	4	4	5
68	5	2	3	3	4	4	4	3	5
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Realisasi Anggaran						
No	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6
1	4	3	4	5	4	4
2	4	4	4	4	4	5
3	4	3	4	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
6	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	5	4	4
9	4	4	4	5	4	4
10	4	4	4	4	4	4
11	5	4	4	5	4	4
12	5	4	4	5	4	4
13	5	5	5	5	5	5
14	5	5	5	5	5	5
15	5	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	5	3
17	5	5	5	5	5	5
18	4	5	4	2	5	4
19	4	4	4	4	4	4
20	5	5	4	5	5	4
21	5	5	5	5	5	5
22	5	5	5	4	5	4
23	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5
26	5	5	5	4	4	4
27	5	5	5	4	4	4

28	5	5	5	4	4	4
29	5	5	5	4	4	4
30	5	5	5	4	4	4
31	5	5	5	4	5	4
32	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4
35	5	5	5	5	5	4
36	5	5	5	5	5	5
37	4	4	5	4	4	5
38	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	3	4	4
40	4	4	3	4	4	3
41	4	5	4	4	4	4
42	4	5	4	4	4	4
43	4	5	4	4	4	4
44	4	5	4	4	4	4
45	4	5	4	4	4	4
46	5	4	4	4	5	5
47	5	5	5	5	5	4
48	5	5	5	5	5	5
49	5	5	4	2	4	4
50	5	4	4	5	4	4
51	5	5	4	5	5	5
52	4	4	5	5	5	5
53	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4
55	4	5	4	5	4	4
56	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	3	4
59	4	4	4	4	3	4
60	4	4	4	4	3	4
61	4	4	4	4	3	4
62	5	4	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4

27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	4	5	5	4	3	5	4	5	5	5
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	2	4	2	2	2	4	4	3	4	3
34	4	5	2	4	2	4	4	4	4	4	5
35	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5
36	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
39	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4
40	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5
41	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
42	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
43	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
44	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
45	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4
46	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
47	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
48	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	5
49	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5
50	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
51	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5
52	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
53	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4

63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	3	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4
68	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5
69	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4

Lampiran 3 : Uji Validitas

1. Perencanaan Anggaran

		Correlations								
		PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	PA7	PA8	JPA
PA1	Pearson Correlation	1	,615**	,480**	,268*	,277*	,285*	,279*	,223	,539**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,026	,021	,018	,020	,066	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA2	Pearson Correlation	,615**	1	,504**	,246*	,283*	,283*	,311**	,295*	,553**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,041	,018	,018	,009	,014	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA3	Pearson Correlation	,480**	,504**	1	,489**	,495**	,627**	,485**	,482**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA4	Pearson Correlation	,268*	,246*	,489**	1	,628**	,490**	,501**	,459**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,026	,041	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA5	Pearson Correlation	,277*	,283*	,495**	,628**	1	,642**	,762**	,613**	,821**
	Sig. (2-tailed)	,021	,018	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA6	Pearson Correlation	,285*	,283*	,627**	,490**	,642**	1	,763**	,846**	,841**
	Sig. (2-tailed)	,018	,018	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA7	Pearson Correlation	,279*	,311**	,485**	,501**	,762**	,763**	1	,785**	,845**
	Sig. (2-tailed)	,020	,009	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PA8	Pearson Correlation	,223	,295*	,482**	,459**	,613**	,846**	,785**	1	,803**
	Sig. (2-tailed)	,066	,014	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69
JPA	Pearson Correlation	,539**	,553**	,754**	,729**	,821**	,841**	,845**	,803**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Pengendalian Intern

Correlations

	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7	PI8	PI9	JPI
PI1 Pearson Correlation	1	,489**	,417**	,325**	,429**	,124	,244*	,404**	-,048	,547**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,006	,000	,309	,044	,001	,695	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI2 Pearson Correlation	,489**	1	,771**	,539**	,323**	,136	,179	,267*	-,105	,630**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,007	,263	,140	,027	,390	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI3 Pearson Correlation	,417**	,771**	1	,597**	,435**	,274*	,218	,217	-,068	,666**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,023	,072	,074	,580	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI4 Pearson Correlation	,325**	,539**	,597**	1	,653**	,447**	,416**	,346**	,341**	,808**
Sig. (2-tailed)	,006	,000	,000		,000	,000	,000	,004	,004	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI5 Pearson Correlation	,429**	,323**	,435**	,653**	1	,453**	,507**	,404**	,505**	,792**
Sig. (2-tailed)	,000	,007	,000	,000		,000	,000	,001	,000	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI6 Pearson Correlation	,124	,136	,274*	,447**	,453**	1	,679**	,379**	,335**	,647**
Sig. (2-tailed)	,309	,263	,023	,000	,000		,000	,001	,005	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI7 Pearson Correlation	,244*	,179	,218	,416**	,507**	,679**	1	,424**	,335**	,665**
Sig. (2-tailed)	,044	,140	,072	,000	,000	,000		,000	,005	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI8 Pearson Correlation	,404**	,267*	,217	,346**	,404**	,379**	,424**	1	,365**	,631**
Sig. (2-tailed)	,001	,027	,074	,004	,001	,001	,000		,002	,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
PI9 Pearson Correlation	-,048	-,105	-,068	,341**	,505**	,335**	,335**	,365**	1	,476**
Sig. (2-tailed)	,695	,390	,580	,004	,000	,005	,005	,002		,000
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
JPI Pearson Correlation	,547**	,630**	,666**	,808**	,792**	,647**	,665**	,631**	,476**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Realisasi Anggaran

Correlations

	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	JRA
RA1 Pearson Correlation	1	,561**	,688**	,430**	,611**	,448**	,811**
Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
N	69	69	69	69	69	69	69
RA2 Pearson Correlation	,561**	1	,588**	,160	,520**	,364**	,692**
Sig. (2-tailed)	,000		,000	,188	,000	,002	,000
N	69	69	69	69	69	69	69
RA3 Pearson Correlation	,688**	,588**	1	,447**	,572**	,606**	,846**
Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
N	69	69	69	69	69	69	69
RA4 Pearson Correlation	,430**	,160	,447**	1	,411**	,465**	,664**
Sig. (2-tailed)	,000	,188	,000		,000	,000	,000
N	69	69	69	69	69	69	69
RA5 Pearson Correlation	,611**	,520**	,572**	,411**	1	,538**	,803**
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
N	69	69	69	69	69	69	69
RA6 Pearson Correlation	,448**	,364**	,606**	,465**	,538**	1	,742**
Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000	,000		,000
N	69	69	69	69	69	69	69
JRA Pearson Correlation	,811**	,692**	,846**	,664**	,803**	,742**	1
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
N	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Correlations													
		AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK6	AK7	AK8	AK9	AK10	AK11	JAK
AK1	Pearson Correlation	1	,400**	,392**	,245*	,175	,349**	,371**	,213	,384**	,717**	,439**	,597**
	Sig. (2-tailed)		,001	,001	,042	,151	,003	,002	,079	,001	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK2	Pearson Correlation	,400**	1	,140	,176	,241*	,479**	,281*	,240*	,169	,350**	,389**	,500**
	Sig. (2-tailed)	,001		,253	,148	,046	,000	,019	,047	,166	,003	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK3	Pearson Correlation	,392**	,140	1	,668**	,579**	,263*	,371**	,317**	,566**	,407**	,316**	,702**
	Sig. (2-tailed)	,001	,253		,000	,000	,029	,002	,008	,000	,001	,008	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK4	Pearson Correlation	,245*	,176	,668**	1	,631**	,373**	,338**	,419**	,549**	,300*	,433**	,738**
	Sig. (2-tailed)	,042	,148	,000		,000	,002	,005	,000	,000	,012	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK5	Pearson Correlation	,175	,241*	,579**	,631**	1	,353**	,523**	,624**	,364**	,308**	,373**	,730**
	Sig. (2-tailed)	,151	,046	,000	,000		,003	,000	,000	,002	,010	,002	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK6	Pearson Correlation	,349**	,479**	,263*	,373**	,353**	1	,361**	,261*	,223	,357**	,315**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,003	,000	,029	,002	,003		,002	,031	,065	,003	,008	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK7	Pearson Correlation	,371**	,281*	,371**	,338**	,523**	,361**	1	,802**	,299*	,495**	,406**	,689**
	Sig. (2-tailed)	,002	,019	,002	,005	,000	,002		,000	,012	,000	,001	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK8	Pearson Correlation	,213	,240*	,317**	,419**	,624**	,261*	,802**	1	,332**	,478**	,565**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,079	,047	,008	,000	,000	,031	,000		,005	,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK9	Pearson Correlation	,384**	,169	,566**	,549**	,364**	,223	,299*	,332**	1	,534**	,521**	,686**
	Sig. (2-tailed)	,001	,166	,000	,000	,002	,065	,012	,005		,000	,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK10	Pearson Correlation	,717**	,350**	,407**	,300*	,308**	,357**	,495**	,478**	,534**	1	,656**	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003	,001	,012	,010	,003	,000	,000	,000		,000	,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
AK11	Pearson Correlation	,439**	,389**	,316**	,433**	,373**	,315**	,406**	,565**	,521**	,656**	1	,724**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,008	,000	,002	,008	,001	,000	,000	,000		,000
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
JAK	Pearson Correlation	,597**	,500**	,702**	,738**	,730**	,574**	,689**	,706**	,686**	,724**	,724**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Realibilitas

1. Perencanaan Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,879	8

2. Pengendalian Intern

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,816	9

3. Realisasi Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,846	6

4. Akuntabilitas Keuangan Daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,875	11

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Andyrwanto** , Nim: **10800111019** tertanggal **05 November 2015** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)** "
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 Jo tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.** , Sebagai Pembimbing Pertama.
2. **Memen Suwandi, SE., M.Si.**, Sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 05 November 2015



Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
1981022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

Nomor : EB.I/PP.00.9/ 124 /2016
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Andyrwanto/10800111019

Samata, 27 Januari 2016

Kepada Yth:

1. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si. Sebagai Pembimbing I
2. Memen Suwandi, SE., M.Si. Sebagai Pembimbing II

Di


Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami mengundang bapak, untuk menghadiri seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Jumat, 29 Januari 2016
Waktu	: 09.00 - Selesai
Judul Skripsi	: Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
Tempat	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ruangan L.202

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,
Dekam

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 320 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Andrywanto** : , NIM: 10800111019
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Ketua | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Sekretaris | : Drs. Laris |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Jamaluddin M, SE., M.Si |
| Penguji Auditing | : Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak. |
| Pelaksana | : Arnidar Hamid, SE. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 18 Februari 2016


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip

Nomor : EB.I/PP.00.9/ 142 /2016
Lamp : -
Perihal : *Permohonan Izin Pra Penelitian*

Samata, 14 Januari 2016

Kepada,

**Yth. Kepala UPT P2T BKPM
Prov. Sulawesi Selatan**

Di –
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

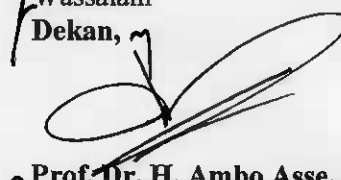
Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama	: Andyrwanto
NIM	: 10800111019
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Malengkeri Raya (Komp. Malengkeri Permai No. 14)

Bermaksud melakukan pra penelitian/pengambilan data dalam rangka penyusunan draft skripsi. Adapun judul draft skripsinya **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)”**.

Dengan dosen pembimbing :
1. **Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.**
2. **Memen Suwandi, SE., M.Si.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **Kantor SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar**.
Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Prof. **Dr. H. Ambo Asse, M.Ag**
NIP : 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan*
3. *Arsip*

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Kemiri Nomor 27 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 22447

Benteng, 09 Februari 2016

Nomor : 070/14/Xesbangpolinmas /II/ 2016
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Surat Pengantar Izin Penelitian

Kepada
Yth. (Daftar Terlampir)

Mendasari surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Nomor : 01102/P2T-BKPMMD/VII/2016, Tanggal 29 Januari 2016 perihal Izin Penelitian. Disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andrywanto
Nomor Pokok : 10800111019
Program studi : Akuntansi
Pekerjaan : Manasiswa
Alamat : Jl.Slt Alauddin No 63, Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansinya dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "Pengaruh perencanaan anggaran, pengendalian Intern dan realisasi anggaran terhadap akuntabilitas keuangan daerah studi skpd kabupaten kepulauan selayar"

Yang akan dilaksanakan dari Tanggal 01 Februari s/d 01 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Kepulauan Selayar cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " LAPORAN" kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas.

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT



H. ARIFUDIN, SE
Pangkat Pembina Tk. I
NIP. 19591215 198903 1 015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng sebagai laporan;
2. Yang Bersangkutan.

TEMPAT PENELITIAN

NO	NAMA SKPD
1	Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Selayar
2	Kadis Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
3	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
4	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar
5	DPPKAD Kabupaten Kepulauan Selayar
6	Dinas Kebersihan Kabupaten Kepulauan Selayar
7	Inspektorat kabupaten Kepulauan Selayar
8	BKD Kabupaten Kepulauan Selayar
9	Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar
11	Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kepulauan Selayar
12	Kesbang Polinmas Kabupaten Kepulauan Selayar
13	Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar
13	Kantor Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Selayar
14	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Kepulauan Selayar
15	Dinas koperasi Kabupaten Kepulauan Selayar



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jln. Kemiri Nomor 27 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 22447

Benteng, 20 Februari 2016

Nomor : 070/03/Kesbangpolinmas/II/2016
Lampiran : -
Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Makassar

di -
Tempat

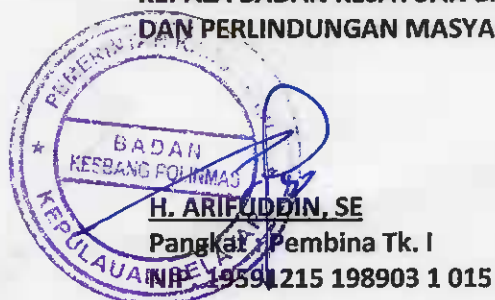
Dasar surat dari DISTARHAN Nomor : 070/035/II/2016/distarhan KP, BKD Nomor: 800/306/II/2016/BKD, INSPEKTORAT Nomor: 070/53/II/2016/ITKAB, DIKNAS Nomor: 400/033/II/2016/diknas, BPPKB Nomor: 800/094/II/2016/BPPKB, DISTANHUT Nomor: TU.210/107/II/2016/distanhut, DISKOPERINDAG Nomor: 800/031/II/2016/Diskoperindag, DINAS ESDM Nomor; 800/97/II/2016/Dis. ESDM. Tanggal 17 Februari 2016, perihal keterangan telah melaksanakan kegiatan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Andyrwanto**
NIM : **10800111019**
Program Study : **Akuntansi**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Beberapa SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan judul Kegiatan “ **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas keuangan Daerah studi SKPD Kabupaten Kepulauan selayar.**”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : EB.1/PP.00.9/2730/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, 21 Juli 2016

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

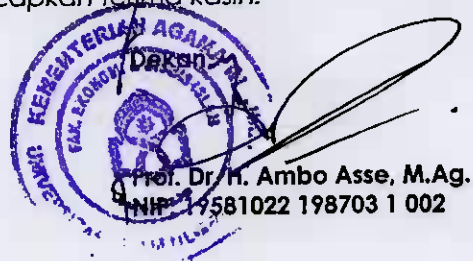
Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Andyrwanto
NIM : 10800111019
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern dan Realisasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2016
Waktu : 09.00 - Selesai
Tempat : Ruang Seminar L.202

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.


Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 698 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Andrywanto, NIM : 10800111019
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nama : Andrywanto, NIM : 10800111019, tertanggal 12 Juli 2016** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
Sekretaris : Jamaluddin M., SE., M.Si.
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.
Pembimbing II : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Penguji I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Penguji II : Saiful, SE., M.SA., Ak.
Pelaksana : Muhammad Irfan

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **20 Juli 2016**

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NIP. 19581022 198703 1 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : EB.1/PP.00.9/3192/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Samata, 26 Agustus 2016

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Andyrwanto
NIM : 10800111019
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kabupaten Kepulauan Selayar)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2016
Waktu : 10.00-12.00 Wita
Tempat : Ruang Ujian

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 877 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **Andyrwanto**
NIM : **10800111019**
Tanggal : **25 Agustus 2016**
Mahasiswa Jurusan : **Akuntansi**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Anggaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kabupaten Kepulauan Selayar)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag**
Sekretaris : Prof. Dr. H. Muslimin.,M.Ag
Penguji I : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak.
Penguji II : Saiful, SE.,M.SA.,Ak
Pembimbing I : Dr. H. Abdul Wahab, SE.,M.Si
Pembimbing II : Momen Suwandi, SE., M.Si.
Pelaksana : Nurmiah Muin.,S.IP.MM
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**
Pada tanggal : **25 Agustus 2016**


Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Andyrwanto, lahir di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1994 merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri Bapak Amirullah dan Ibu Sitti Nuraeni, S.Pd. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 46 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kab. Kepulauan Selayar.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SD Inpres Benteng Timur Kabupaten Kepulauan Selayar lulus pada tahun 2005, SMP Negeri 1 Benteng lulus pada tahun 2008, SMA Negeri 1 Benteng lulus pada tahun 2011 dan sampai dengan penulisan skripsi ini masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).